



PROSPEK PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian IV

PROSPEK PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah perekonomian yang mulai membaik pada triwulan IV 2013 menjadi modal penting bagi prospek ekonomi ke depan. Bank Indonesia memperkirakan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi akan lebih berimbang sehingga akan semakin memperkuat stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 5,5%-5,9% dengan sumber pertumbuhan yang lebih seimbang antara permintaan eksternal dan permintaan domestik. Permintaan eksternal diperkirakan terus membaik sehingga ekspor akan meningkat sedangkan permintaan domestik masih moderat sehingga impor dan inflasi akan tetap terkendali. Dengan demikian, rasio defisit transaksi berjalan terhadap PDB diperkirakan akan menurun menjadi di bawah 3,0% dan laju inflasi diperkirakan akan berada pada kisaran sasaran 4,5%±1%.

Meskipun membaik, prospek perekonomian Indonesia tahun 2014 masih dihadapkan pada beberapa faktor risiko, baik yang bersifat global maupun domestik. Di sisi global, proses *rebalancing* ekonomi China yang semula berorientasi investasi menjadi konsumsi dapat mengurangi ekspor. Selain itu, suasana ketidakpastian yang mengiringi implementasi kebijakan *tapering off* oleh the Fed dapat mengurangi arus masuk modal portofolio. Di sisi domestik, terdapat risiko kenaikan laju inflasi yang bersumber dari dampak gangguan cuaca dan bencana alam terhadap harga bahan makanan serta dampak lanjutan dari kenaikan harga barang *administered* dan pelemahan nilai tukar. Terkait implementasi UU Minerba, kebijakan ini dalam jangka menengah berdampak positif terhadap ekspor, tetapi dalam jangka pendek dapat mengurangi ekspor jika proses pembangunan smelter tidak berjalan lancar sesuai rencana.

Dinamika perekonomian Indonesia selama 2013 memberikan beberapa pelajaran berharga bagi kita dalam menghadapi berbagai faktor risiko tersebut. Pertama,

pentingnya kebijakan makroekonomi, baik fiskal maupun moneter, yang disiplin dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Kedua, respons kebijakan tidak hanya dapat dengan menggunakan satu jenis kebijakan, tapi perlu dengan satu bauran kebijakan. Ketiga, respon kebijakan yang kuat (*bold*) mensyaratkan pentingnya dukungan sistem keuangan dan neraca korporasi yang sehat. Keempat, komunikasi yang intensif sangat penting untuk menjangkar persepsi pasar. Kelima, pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Keenam, penguatan kebijakan struktural sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaan subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.

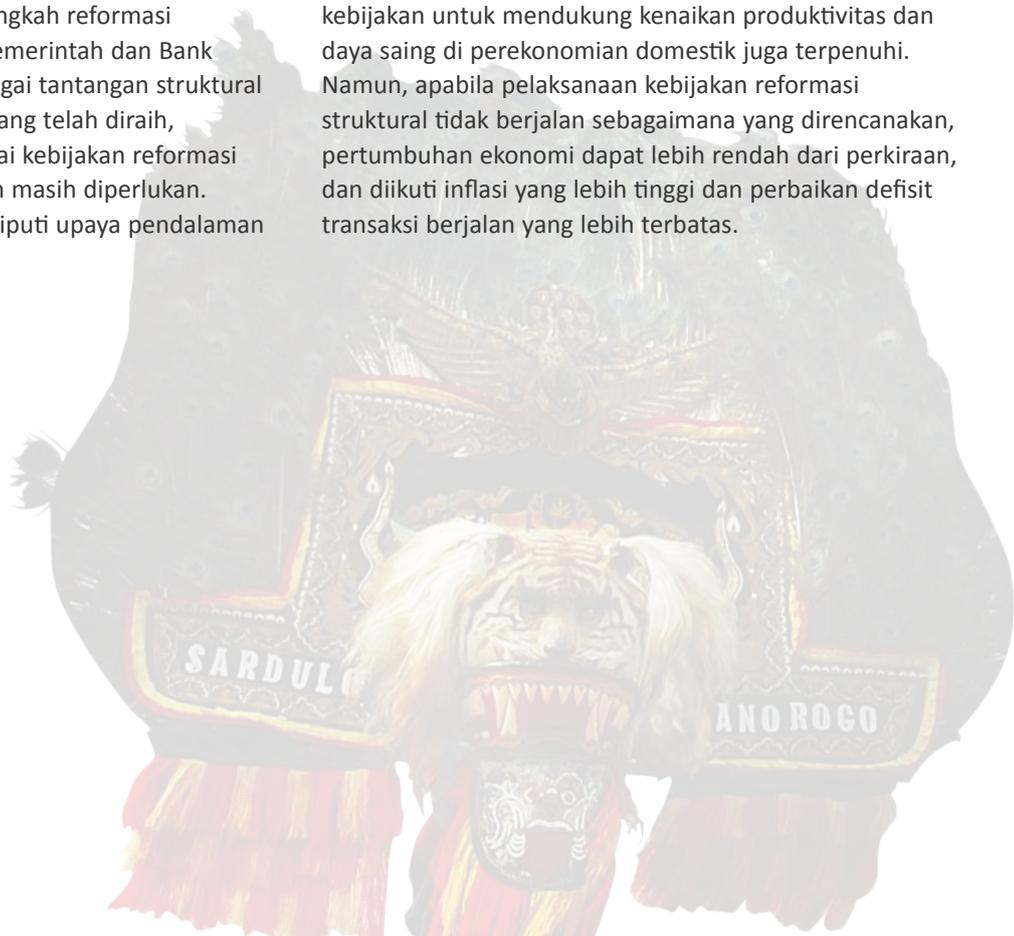
Mengacu kepada beberapa pelajaran berharga tersebut, untuk memperkuat prospek ekonomi tersebut sekaligus merespon berbagai risiko yang ada, arah kebijakan Bank Indonesia akan tetap difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia juga akan meningkatkan upaya perluasan akses masyarakat terhadap perbankan (*financial inclusion*).

Kebijakan sistem pembayaran akan tetap diarahkan pada pengembangan industri sistem pembayaran domestik yang lebih aman, efisien, dan lancar. Seluruh kebijakan tersebut akan diperkuat dengan berbagai langkah koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas sektor keuangan terkait.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi dengan laju inflasi yang lebih rendah dan postur transaksi berjalan yang lebih sehat. Namun, prognosa ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural yang saat ini masih menyelimuti perekonomian domestik. Beberapa tantangan tersebut berkaitan dengan permasalahan pada struktur pembiayaan, struktur produksi domestik, termasuk ketahanan energi dan ketahanan pangan serta dampaknya terhadap pengelolaan subsidi di APBN, dan ketersediaan modal dasar pembangunan. Berbagai langkah reformasi struktural telah ditempuh oleh Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan struktural tersebut. Terlepas dari capaian yang telah diraih, percepatan implementasi berbagai kebijakan reformasi struktural yang telah dicanangkan masih diperlukan. Kebijakan struktural tersebut meliputi upaya pendalaman

pasar keuangan domestik, upaya penguatan striktur produksi dan integrasi rantai nilai global, dan upaya mengelola subsidi BBM secara optimal guna memberikan ruang gerak fiskal dalam mendukung pertumbuhan yang berkesinambungan. Percepatan berbagai upaya reformasi struktural tersebut diperkirakan dapat menghindarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).

Bank Indonesia memperkirakan apabila reformasi struktural dapat berjalan baik, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,5% pada 2018 dengan tingkat inflasi yang menurun sesuai target jangka menengah dan defisit transaksi berjalan yang lebih sehat. Prospek perekonomian dalam jangka bahkan dapat lebih tinggi bila berbagai upaya peningkatan kapabilitas industri dapat berjalan sesuai harapan. Lebih jauh, prospek ekonomi Indonesia dapat lebih meningkat apabila prakondisi kebijakan untuk mendukung kenaikan produktivitas dan daya saing di perekonomian domestik juga terpenuhi. Namun, apabila pelaksanaan kebijakan reformasi struktural tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan, pertumbuhan ekonomi dapat lebih rendah dari perkiraan, dan diikuti inflasi yang lebih tinggi dan perbaikan defisit transaksi berjalan yang lebih terbatas.





Prospek Ekonomi Jangka Pendek dan Arah Kebijakan Bank Indonesia

Kendati masih dihadapkan pada beberapa faktor risiko, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014-2015 diperkirakan akan lebih berimbang. Permintaan eksternal diperkirakan meningkat dan diikuti permintaan domestik yang masih termoderasi sehingga akan semakin memperkuat stabilitas ekonomi. Ke depan, kebijakan Bank Indonesia masih tetap diarahkan terutama untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk memberikan landasan yang kuat bagi percepatan reformasi struktural yang diperlukan.

Arah perekonomian yang mulai membaik pada triwulan IV 2013 menjadi modal penting bagi prospek ekonomi ke depan. Bank Indonesia memperkirakan stabilitas ekonomi pada tahun 2014-2015 tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi akan lebih seimbang sehingga dapat menurunkan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat dan mengendalikan laju inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan. Namun, beberapa faktor risiko, baik yang bersifat global maupun domestik, masih mengemuka. Di sisi global, faktor risiko datang dari dampak pergeseran lanskap ekonomi global dan proses *rebalancing* ekonomi China yang berpengaruh terhadap arus masuk modal dan kinerja ekspor Indonesia. Di sisi domestik, faktor risiko datang dari dampak gangguan cuaca, bencana alam, kenaikan harga *administered*, pelemahan nilai tukar, dan implementasi UU Minerba. Faktor risiko dari sisi domestik tersebut berdampak terhadap laju inflasi dan kinerja ekspor Indonesia.

Dinamika perekonomian Indonesia 2013 mengangkat beberapa pelajaran berharga bagi upaya mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pelajaran pertama ialah pentingnya kebijakan makroekonomi, baik fiskal maupun moneter, yang disiplin dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Perjalanan ekonomi 2013 menunjukkan kebijakan makroekonomi tetap perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara berlebihan yang dapat memberikan tekanan bagi transaksi berjalan dan inflasi. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter yang *pre-emptive* dan tetap fokus kepada pengendalian inflasi serta kebijakan fiskal yang tetap konsisten menjaga ketahanan fiskal menjadi basis kuat bagi penguatan ketahanan perekonomian secara keseluruhan. Kedua, di tengah tantangan, baik yang bersifat siklikal maupun struktural, respons kebijakan tidak dapat bergantung pada satu jenis kebijakan. Penggunaan satu jenis kebijakan atau instrumen untuk mengatasi permasalahan yang bersifat kompleks menyebabkan dilema-dilema kebijakan yang sulit untuk dipecahkan. Ketiga, di tengah meningkatnya tekanan pada perekonomian, respons kebijakan yang kuat (*bold*) mensyaratkan pentingnya dukungan sistem keuangan dan neraca korporasi yang sehat. Tanpa itu, kebijakan dihadapkan pada menguatnya dilema antara upaya stabilisasi dan lemahnya sistem keuangan dan korporasi. Keempat, pentingnya komunikasi yang intensif untuk menjangkar persepsi pasar. Kelima, koordinasi yang erat antar pemangku kebijakan menjadi elemen penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan. Keenam, pentingnya penguatan kebijakan struktural dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berangkat dari pelajaran dinamika ekonomi 2013 tersebut serta mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang dihadapi, Bank Indonesia pada tahun 2014 akan tetap memfokuskan kebijakannya pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan. Kebijakan moneter, melalui instrumen suku bunga dan nilai tukar, akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia juga akan meningkatkan upaya perluasan akses masyarakat terhadap perbankan (*financial inclusion*). Kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan pada pengembangan industri sistem pembayaran domestik yang lebih aman, efisien, dan lancar. Seluruh kebijakan tersebut akan diperkuat dengan berbagai langkah koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas sektor keuangan terkait.

14.1. Prospek Perekonomian Jangka Pendek

Bank Indonesia memperkirakan prospek ekonomi negara maju akan semakin membaik pada tahun 2014 (Tabel 14.1). Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan menunjukkan tren kinerja yang tetap membaik, ditandai oleh permintaan domestik yang terus menguat. Perbaikan tersebut didukung pula oleh konsolidasi fiskal pada tahun 2014. Sementara itu, kondisi perekonomian di kawasan Eropa juga terus menunjukkan tanda pemulihan. Di sisi lain, perekonomian Jepang diperkirakan tumbuh melambat sebagai respons terhadap pengetatan fiskal pada tahun 2014. Di negara berkembang, perekonomian China diperkirakan relatif stabil sejalan dengan proses transisi menuju pertumbuhan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Demikian pula dengan perekonomian India yang diperkirakan tetap tumbuh, ditopang oleh kebijakan struktural yang mendukung investasi.

Secara keseluruhan, kinerja perekonomian global pada tahun 2014 dan 2015 diperkirakan akan membaik dengan kecepatan yang moderat. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mampu tumbuh 3,9% pada tahun 2015 dan mendorong kenaikan pertumbuhan volume perdagangan dunia hingga mencapai 5,1%. Seiring dengan kinerja

Tabel 14.1. Proyeksi PDB Dunia

Negara	Proyeksi		
	2013	2014	2015
PDB Dunia	3,0	3,6	3,9
Amerika Serikat	1,9	2,8	3,0
Jepang	1,7	1,7	1,1
Kawasan Eropa	-0,4	0,9	1,4
China	7,7	7,5	7,5
India	4,4	5,3	6,4

perekonomian dunia yang semakin menguat, harga komoditas nonmigas juga diperkirakan mampu tumbuh positif masing-masing sekitar 2,1% pada tahun 2015 setelah tumbuh negatif sebesar 8,8% di sepanjang 2013. Di sisi lain, kemungkinan adanya tambahan pasokan minyak mentah di AS diperkirakan akan mendorong penurunan harga minyak dunia ke level 100 dolar AS per barel pada tahun 2015. Sementara itu, pemulihan ekonomi di negara maju akan diikuti oleh pengetatan kebijakan moneter yang diindikasikan oleh suku bunga LIBOR yang mulai meningkat hingga mencapai 0,73% pada tahun 2015.

Seiring dengan perkiraan kondisi ekonomi global yang semakin kondusif, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,5%-5,9%. Seiring dengan pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan lebih banyak didorong oleh perbaikan permintaan eksternal sementara pertumbuhan permintaan domestik diperkirakan relatif moderat (Tabel 14.2).

Konsumsi rumah tangga tahun 2014 diperkirakan tumbuh moderat pada kisaran 4,9%-5,3%. Pertumbuhan konsumsi ditopang oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk Indonesia (*dependency ratio*) sehingga memberikan ruang lebih bagi para pekerja untuk meningkatkan konsumsinya (Grafik 14.1). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendukung daya beli sehingga turut mendorong konsumsi masyarakat, yaitu adanya kenaikan upah buruh dan gaji pegawai negeri sipil, TNI/Polri serta pensiunan dan turunnya laju inflasi ke rentang target 4,5%±1%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung pula oleh adanya aktivitas kampanye serta penyelenggaraan Pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014. Namun, dampak keseluruhan dari Pemilu 2014 terhadap pertumbuhan ekonomi 2014 diperkirakan sebesar 0,1% lebih rendah dibandingkan dengan dampak Pemilu 2009, yang mencapai 0,2%. Lebih rendahnya perkiraan tersebut disebabkan oleh pengaturan terhadap pelaksanaan aktivitas dan penggunaan dana terkait Pemilu agar lebih efisien dan tepat guna. Di sisi lain, kenaikan konsumsi rumah tangga yang berasal dari kegiatan

Tabel 14.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sisi Penggunaan

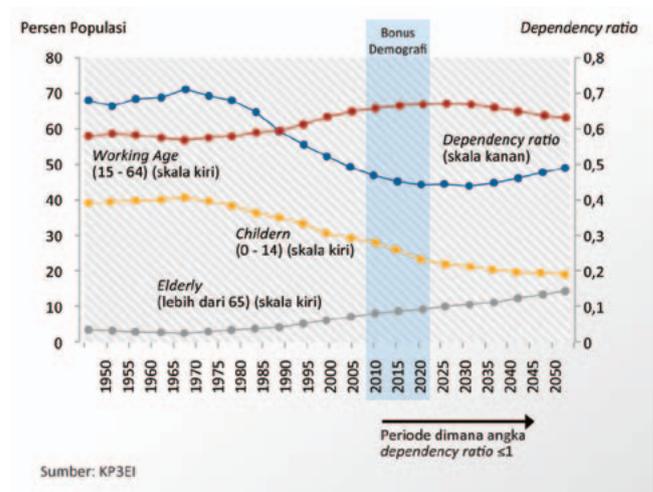
Komponen	2013	2014*	2015*
Konsumsi Rumah Tangga	5,3	4,9 - 5,3	5,0 - 5,4
Konsumsi Pemerintah	4,9	6,0 - 6,4	3,4 - 3,8
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,7	5,4 - 5,8	5,8 - 6,2
Ekspor Barang dan Jasa	5,3	8,1 - 8,5	8,5 - 8,9
Impor Barang dan Jasa	1,2	5,4 - 5,8	7,1 - 7,5
PDB	5,8	5,5 - 5,9	5,8 - 6,2

* Proyeksi Bank Indonesia

Pemilu diperkirakan tidak berdampak signifikan terhadap inflasi karena sebagian besar berbentuk pengeluaran iklan.

Konsumsi pemerintah secara riil pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh sekitar 6,0%-6,4%, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, antara lain terkait pengeluaran Pemilu. Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014, pelaksanaan kebijakan belanja negara tahun 2014 secara substansial akan tetap diarahkan pada empat pilar. Pertama, mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (*pro growth*). Kedua, meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (*pro job*). Ketiga, meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (*pro poor*). Terakhir, mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro environment*).

Investasi pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4%-5,8% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Prakiraan tersebut didukung oleh upaya Pemerintah dalam meningkatkan efektivitas belanja negara dengan



Grafik 14.1. Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia

memperbesar alokasi belanja yang produktif. Alokasi belanja produktif akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Komitmen Pemerintah ini tercermin pada rencana peningkatan alokasi belanja modal dari Rp192,6 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp229,5 triliun pada tahun 2014. Peningkatan belanja modal tersebut pada gilirannya dapat menciptakan nilai tambah (*value added*), meningkatkan kapasitas perekonomian, dan memperluas kesempatan kerja.

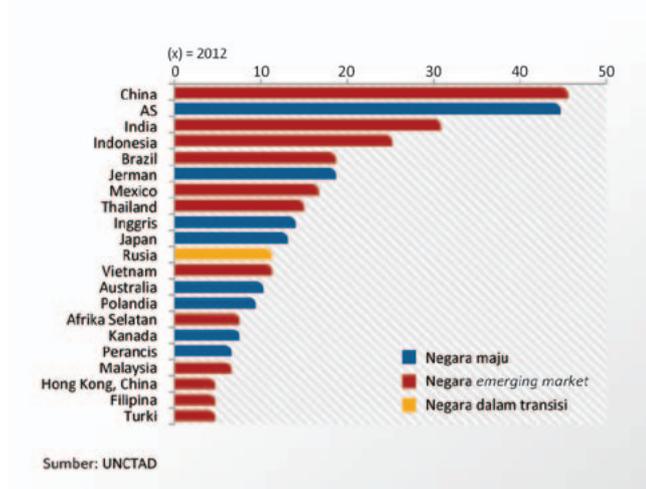
Prakiraan investasi yang meningkat tersebut didukung pula oleh persepsi pelaku usaha yang positif terhadap prospek investasi ke depan. Hal ini tergambar pada publikasi *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Prospect Survey 2013-2015*, yang menempatkan Indonesia pada posisi keempat sebagai negara tujuan investasi paling prospektif (Grafik 14.2). Hal ini juga diperkuat oleh hasil penilaian lembaga pemeringkat kredit yang menempatkan Indonesia ke dalam *investment grade* (lihat Boks 14.1 Analisis *Credit Rating* Indonesia). Sementara itu, sejalan dengan penerapan UU Minerba, investasi berupa pembangunan *smelter* diperkirakan mampu mendorong tingkat investasi. Namun, di tengah optimisme tersebut, proyeksi pertumbuhan investasi 2014 ini masih cukup moderat mengingat adanya potensi perilaku *wait and see* dari pelaku usaha selama periode pelaksanaan Pemilu 2014.

Pertumbuhan ekspor pada tahun 2014 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan pertumbuhan ekspor sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia (Grafik 14.3). Sebagian besar negara dan kawasan tujuan utama ekspor Indonesia diperkirakan berada dalam tren pertumbuhan ekonomi

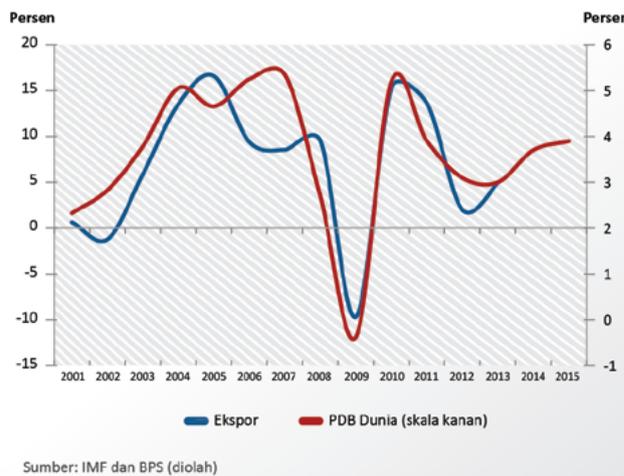
yang meningkat dalam beberapa tahun ke depan sehingga berpotensi mendorong permintaan barang ekspor Indonesia. Di sisi lain, penerapan kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah diperkirakan dapat menekan kinerja ekspor tahun 2014. Namun, dengan langkah-langkah peningkatan daya saing serta diversifikasi pasar dan produk ekspor, pertumbuhan ekspor riil Indonesia diperkirakan meningkat dalam kisaran 8,1%-8,5%.

Peningkatan ekspor dan investasi menyebabkan kebutuhan impor tahun 2014 ikut meningkat pada kisaran 5,4%-5,8%. Sejalan dengan perkiraan investasi yang tumbuh lebih tinggi, pertumbuhan impor barang modal dalam bentuk mesin dan perlengkapan, di antaranya terkait dengan pembangunan *smelter*, diperkirakan turut meningkat. Kegiatan produksi yang diperkirakan masih tetap kuat, antara lain untuk memenuhi permintaan ekspor yang tumbuh lebih cepat, akan mendorong peningkatan permintaan impor bahan baku. Meskipun demikian, berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi impor, seperti penggunaan bahan bakar nabati yang diproduksi dalam negeri dan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor barang tertentu, menyebabkan pertumbuhan impor tersebut relatif moderat dan lebih rendah daripada pertumbuhan ekspor.

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan lebih tinggi daripada tahun 2014, yakni mencapai kisaran 5,8%-6,2%. Hal ini terutama didukung permintaan investasi yang tumbuh lebih tinggi setelah adanya kepastian pemerintahan setelah Pemilu 2014 dan pertumbuhan ekspor yang meningkat seiring dengan perkiraan laju pertumbuhan perekonomian global yang menguat dan harga komoditas internasional yang membaik.



Grafik 14.2. Negara Utama Tujuan Investasi



Grafik 14.3. Pergerakan Ekspor Indonesia dan Pertumbuhan PDB Dunia

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Pemilu 2014 diperkirakan akan turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui peningkatan belanja pada sektor jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor PHR. Di sisi lain, seperti yang terjadi di tahun sebelumnya, sektor pertambangan diperkirakan masih tumbuh terbatas (Tabel 14.3).

Sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh moderat hingga mencapai 5,3%-5,7% pada tahun 2014. Di tengah kondisi perekonomian global yang semakin pulih dan volume perdagangan dunia yang kembali meningkat, masih berlanjutnya proses stabilisasi mampu mendorong sektor industri pengolahan tumbuh secara moderat. Prospek tersebut tidak terlepas dari sejumlah kebijakan pemerintah dalam memulihkan kinerja sektor industri pengolahan, antara lain melalui program akselerasi dan revitalisasi industri. Di samping itu, penyelenggaraan Pemilu 2014 diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan subsektor industri makanan dan minuman lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Pada subsektor industri alat angkut, diperkirakan terjadi peningkatan pertumbuhan akibat aktivitas produksi dan ekspor mobil *low cost green car* (LCGC) ke beberapa negara, serta dijadikannya Indonesia sebagai basis produksi mobil-mobil baru. Pada gilirannya, peningkatan produksi otomotif, disertai dengan penyelesaian konstruksi pabrik produksi baja, diperkirakan dapat meningkatkan kinerja subsektor industri logam dasar besi.

Kinerja sektor PHR diperkirakan semakin membaik dan mampu tumbuh hingga mencapai 5,6%-6,0% pada tahun

2014. Pencapaian ini didorong oleh daya beli masyarakat yang relatif stabil dan semakin berkembangnya pariwisata domestik. Jumlah wisatawan, baik mancanegara maupun domestik diperkirakan meningkat (Grafik 14.4). Perkembangan ini akan dapat mendorong minat subsektor hotel untuk melakukan ekspansi usaha. Ekspansi tersebut dilakukan oleh pelaku usaha perhotelan dengan membangun fasilitas pendukung kegiatan usaha di bidang *meeting, incentive, convention, dan exhibition* (MICE) seperti pembangunan ruang pameran (*exhibition hall*). Di sisi lain, aktivitas ekonomi menjelang dan selama Pemilu 2014, seperti rapat kerja nasional, rapat koordinasi nasional, dan kampanye pemenangan anggota legislatif, juga diperkirakan akan meningkatkan frekuensi penggunaan ruang konvensi/pertemuan yang disediakan oleh sektor ini.

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada 2014 diperkirakan tumbuh 10,5%-10,9%. Kegiatan Pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2014 diperkirakan turut mendorong pertumbuhan sektor ini. Selain itu, sejalan dengan aktivitas perdagangan dan ekspor-impor yang makin tinggi, subsektor pengangkutan juga turut meningkat. Hal ini tercermin pada aktivitas bongkar muat barang yang juga diperkirakan terus meningkat. Dalam rangka mendukung perkembangan angkutan darat, Pemerintah akan membeli 400 bus guna melayani jalur perintis. Di angkutan udara, diperkirakan sebanyak 160 rute perintis akan dibuka untuk menghubungkan area terpencil. Peningkatan jumlah armada sejumlah maskapai penerbangan domestik di sepanjang 2014 diperkirakan mampu mendorong laju pertumbuhan sektor angkutan. Di tengah optimisme tersebut, pertumbuhan subsektor pengangkutan dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain kenaikan tarif jasa angkutan terutama angkutan jalan raya setelah kenaikan harga BBM bersubsidi dan

Tabel 14.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sisi Sektoral

Komponen	2013	2014*	2015*
Pertanian, Perternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,5	3,0 - 3,4	3,0 - 3,4
Pertambangan dan Penggalian	1,3	1,3 - 1,7	1,4 - 1,8
Industri Pengolahan	5,6	5,3 - 5,7	5,6 - 6,0
Listrik, Gas dan Air Bersih	5,6	5,9 - 6,3	5,9 - 6,3
Bangunan	6,6	6,2 - 6,6	6,5 - 6,9
Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,9	5,6 - 6,0	5,9 - 6,3
Pengangkutan dan Komunikasi	10,2	10,5 - 10,9	10,7 - 11,1
Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7,6	6,5 - 6,9	6,7 - 7,1
Jasa-jasa	5,5	5,2 - 5,6	5,2 - 5,6
PDB	5,8	5,5 - 5,9	5,8 - 6,2

*Proyeksi Bank Indonesia



p = perkiraan

Sumber: BPS, Business Monitor International (BMI)

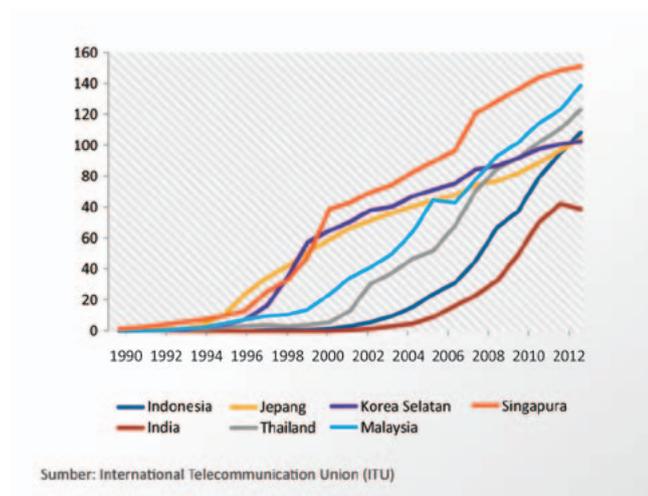
Grafik 14.4. Perkiraan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik

dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap kenaikan harga bahan bakar pesawat. Kebutuhan akan penggunaan telepon genggam dan cakupan jaringan komunikasi sejalan dengan ekspansi kelas menengah, juga membuat kebutuhan terhadap data dan *traffic* komunikasi terus bertambah. Kondisi ini tercermin pada data historis pengguna telepon genggam per 100 penduduk yang terus meningkat (Grafik 14.5). Selain itu, belanja terkait Pemilu 2014 juga diperkirakan dapat mendorong peningkatan aktivitas perjalanan dan komunikasi.

Sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh moderat sekitar 6,5%-6,9% di tengah proses penyesuaian ekonomi yang masih berlanjut. Belanja pemilu 2014 melalui subsektor jasa perusahaan diperkirakan akan meningkatkan belanja iklan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Di tengah prospek positif tersebut, pada subsektor keuangan, dampak peningkatan harga BBM di 2013 diperkirakan masih berlanjut yang ditandai dengan ekspansi kredit yang tumbuh melambat. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan suku bunga kebijakan yang berpotensi menurunkan prospek profitabilitas perbankan nasional karena tergerusnya margin bunga bersih (*net interest margin*).

Semakin pulihnya perekonomian global berdampak pada prospek perekonomian domestik yang tetap terjaga pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap didorong oleh tiga sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, PHR, serta pengangkutan dan komunikasi. Selain itu, kinerja ekonomi yang lebih baik tersebut juga ditopang oleh daya beli yang tetap resilien sejalan dengan ekspansi kelas menengah yang tetap berlanjut.

Inflasi pada tahun 2014 diperkirakan menurun dan berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar $4,5\% \pm 1\%$. Tekanan

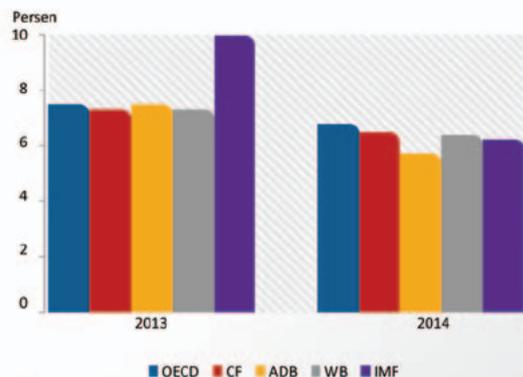


Grafik 14.5. Data Historis Pengguna Telepon Genggam per 100 Penduduk

inflasi yang berasal dari sisi eksternal diperkirakan relatif rendah seiring dengan perbaikan perekonomian dunia yang berlangsung secara gradual dan peningkatan harga-harga komoditas internasional yang diperkirakan masih moderat. Di sisi domestik, dampak kenaikan BI Rate pada tahun 2013 menyebabkan tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan relatif moderat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah tingkat potensialnya dan utilisasi kapasitas yang masih rendah dibandingkan dengan historisnya. Meskipun konsumsi rumah tangga meningkat, ekspektasi inflasi diperkirakan tetap terjaga dengan dukungan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Di luar rencana kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL), Pemerintah diperkirakan tidak akan menaikkan harga barang dan jasa lain yang bersifat strategis (*strategic administered prices*). Selain itu, produksi dan distribusi bahan makanan juga diperkirakan tidak mengalami gangguan. Membaiknya prospek inflasi sejalan dengan proyeksi dari berbagai lembaga internasional yang memperkirakan tekanan inflasi akan menurun pada tahun 2014 (Grafik 14.6).

Tekanan inflasi inti pada tahun 2014 diperkirakan moderat di kisaran rata-rata historisnya dengan kontribusi terhadap IHK masih merupakan yang terbesar. Terjaganya tekanan inflasi inti dari sisi eksternal terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi global yang berlangsung secara gradual dan kenaikan harga komoditas yang relatif moderat. Harga minyak internasional yang diperkirakan menurun pada tahun 2014 akibat potensi peningkatan pasokan minyak dari AS menyebabkan dampak kenaikan harga komoditas internasional terhadap inflasi inti relatif rendah. Dari sisi domestik, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan masih dapat direspons oleh sisi penawaran, sebagaimana terlihat dari kapasitas produksi yang relatif rendah dan pertumbuhan PDB yang masih berada di bawah tingkat potensialnya. Dengan kondisi tersebut, tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan relatif minimal. Ekspektasi inflasi diperkirakan tetap terjaga seiring dengan bauran kebijakan moneter dan koordinasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengendalikan dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Inflasi dari kelompok *volatile food* pada tahun 2014 diperkirakan lebih rendah dibandingkan inflasi *volatile food* tahun 2013. Perkiraan tersebut terkait dengan tidak adanya lagi dampak tahunan kenaikan harga BBM yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 lalu. Faktor cuaca yang kurang kondusif serta terhambatnya jalur distribusi akibat berbagai bencana dan kerusakan jalan berpotensi meningkatkan tekanan pada inflasi bahan makanan.



Sumber:
 [1] OECD, November 2013
 [2] Consensus Forecast, Januari 2014
 [3] ADB, Asia Development Outlook Update, October 2013
 [4] World Bank, Indonesia Economic Quarterly, Desember 2013
 [5] IMF, World Economic Outlook, October 2013

Grafik 14.6. Perbandingan Proyeksi Inflasi Indonesia

Namun, peningkatan produksi dan distribusi bahan makanan dan tata niaga yang lebih baik diperkirakan dapat meredam kenaikan laju inflasi *volatile food*. Pada APBN 2014, Pemerintah mengalokasikan dana infrastruktur yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Anggaran infrastruktur tersebut antara lain akan dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan/jembatan serta pembangunan waduk dan peningkatan irigasi pertanian. Selain itu, dukungan terhadap produksi pertanian juga diberikan dalam bentuk subsidi benih dan pupuk. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi bahan makanan.

Inflasi kelompok *administered prices* diperkirakan kembali menurun pada tahun 2014 dan berada pada kisaran rata-rata historisnya. Sumber tekanan inflasi di kelompok ini pada tahun 2014 diperkirakan berasal dari kenaikan tarif tenaga listrik (TTL), namun tidak akan terlalu mengganggu upaya Bank Indonesia dalam mengarahkan inflasi menuju sasaran inflasi tahun 2014 sebesar 4,5%±1%.

Pada tahun 2015, inflasi diperkirakan dapat diturunkan ke dalam rentang sasaran 4,0%±1%, didukung berbagai kebijakan yang ditempuh untuk mengendalikan inflasi. Inflasi inti diperkirakan masih akan terjaga dengan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* diperkirakan akan cenderung menurun seiring dengan peningkatan produksi bahan makanan dan tata niaga yang lebih baik. Inflasi *administered prices* diperkirakan kembali pada level yang rendah apabila tidak ada kebijakan untuk menaikkan harga barang atau jasa yang bersifat strategis.

Prospek neraca pembayaran diperkirakan membaik pada tahun 2014, didukung oleh defisit transaksi berjalan yang

menurun di bawah 3,0% dari PDB, lebih rendah daripada tahun 2013. Penurunan defisit transaksi berjalan ini terutama didukung oleh pemulihan ekonomi global dan harga komoditas internasional yang mengangkat kinerja ekspor. Selain itu, penurunan defisit transaksi berjalan juga didukung oleh berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah dalam membatasi impor, antara lain melalui peningkatan penggunaan biodiesel dan peningkatan pajak untuk barang impor. Di sisi transaksi modal dan finansial, aliran modal asing diperkirakan masih meningkat untuk keseluruhan tahun 2014. Optimisme ini didukung oleh kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilisasi makroekonomi, defisit transaksi berjalan yang menurun, dan kondisi pasar finansial global yang semakin membaik. Terus membaiknya kondisi pembiayaan eksternal tersebut akan menopang pemulihan keseimbangan neraca pembayaran Indonesia dan memperkuat cadangan devisa.

Prospek perbankan pada tahun 2014 masih dibayangi oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif moderat dan suku bunga yang masih relatif tinggi. Dalam kaitan ini, pertumbuhan kredit perbankan tahun 2014 diperkirakan melambat pada kisaran 15%-17%, dengan ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga pada kisaran yang sama. Kisaran proyeksi pertumbuhan kredit tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia menstabilkan kondisi perekonomian domestik. Bank Indonesia akan terus mendorong peran aktif perbankan dalam mendukung upaya pengelolaan ekonomi ke arah yang lebih sehat melalui perumusan target pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis bank 2014 yang sesuai dengan kisaran tersebut.

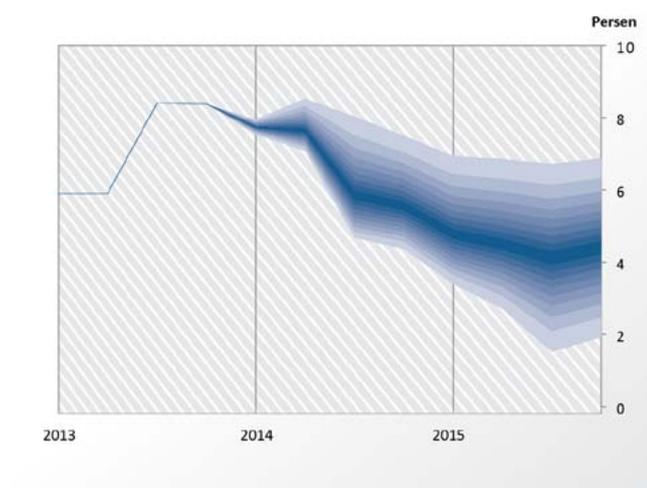
Walaupun prospek ekonomi Indonesia dalam jangka pendek relatif membaik dengan komposisi sumber-sumber pertumbuhan yang lebih seimbang, terdapat beberapa faktor risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi ke depan. Dari sisi eksternal, normalisasi kebijakan the Fed menimbulkan risiko terjadinya aliran modal keluar dari perekonomian domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian dan perkiraan menyempitnya selisih imbal hasil antara US Treasury dan SUN. Sementara itu, perlambatan ekonomi China, sejalan dengan menurunnya pertumbuhan kredit dan likuiditas serta meningkatnya *cost of capital* di negara tersebut, dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui jalur ekspor.

Dari sisi domestik, faktor risiko terutama terdapat pada tekanan inflasi sehingga memengaruhi proyeksi inflasi ke depan (Grafik 14.7). Faktor risiko tersebut antara lain bersumber dari kemungkinan implementasi kebijakan *fixed subsidy* BBM dan lanjutan kenaikan harga LPG 12

kg, serta kemungkinan naiknya tarif tenaga listrik (TTL) di kelompok industri I-3 yang belum *go-public* sehingga berpotensi menaikkan inflasi *administered prices*. Potensi terjadinya gangguan produksi dan distribusi bahan makanan akibat gangguan cuaca dan bencana alam dikhawatirkan dapat meningkatkan tekanan inflasi *volatile food*.

Risiko domestik kedua terkait dampak pelemahan nilai tukar yang belum sepenuhnya direalisasikan pada tahun 2013 sehingga berpotensi mendorong tingkat harga pada tahun 2014. Pada tahun 2013, depresiasi rupiah belum sepenuhnya ditransmisikan kepada inflasi inti karena pelaku usaha cenderung menahan harga jual. Beberapa faktor yang menahan dampak depresiasi terhadap inflasi selama 2013 ialah (i) daya beli masyarakat yang melemah akibat kenaikan inflasi (dampak kenaikan harga BBM bersubsidi); (ii) adanya kontrak berjangka waktu, sehingga penyesuaian dilakukan berdasarkan kontrak baru; dan (iii) tingkat persaingan usaha yang tinggi, sehingga pelaku usaha cenderung sebagai *price taker*. Pada tahun 2014, risiko ini perlu dicermati terkait kemungkinan produsen mulai meneruskan dampak pelemahan rupiah ini kepada kenaikan harga barang.

Risiko domestik terakhir berkaitan dengan dampak implementasi UU Mineral dan Batubara (Minerba) terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan transaksi berjalan dalam jangka pendek. Risiko ini terutama mengemuka dalam jangka pendek. Kebijakan ini berpotensi menekan pertumbuhan ekspor jika pembangunan smelter tidak berjalan secepat yang direncanakan, meskipun dalam jangka menengah dapat meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia secara signifikan.



Grafik 14.7. Fanchart Inflasi 2014-2015

14.2. Arah Kebijakan Bank Indonesia

Dengan melihat prospek dan faktor risiko yang ada, kebijakan Bank Indonesia ke depan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan untuk mengendalikan inflasi sesuai sasarannya dan menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Kebijakan ini ditempuh melalui kebijakan suku bunga dan nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya. Dalam hal ini, nilai tukar diharapkan dapat berperan menjadi instrumen peredam gejolak (*shock absorber*), bukan sebaliknya sebagai pemicu gejolak (*shock amplifier*) perekonomian. Bank Indonesia juga akan terus melakukan penguatan operasi moneter, lalu lintas devisa dan melanjutkan program pendalaman pasar keuangan untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam membiayai pembangunan. Di samping itu, dalam rangka mengantisipasi risiko ketidakpastian kondisi ekonomi global, Bank Indonesia melanjutkan langkah-langkah penguatan *second line of defense* melalui kerjasama keuangan dengan bank sentral dan otoritas keuangan di kawasan.

Kebijakan makroprudensial akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan sistem perbankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia juga akan memperkuat pelaksanaan fungsi dan kewenangan baru sebagai otoritas makroprudensial. Dalam kaitan ini, kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada pengelolaan risiko sistemik, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan penguatan struktur permodalan. Selain itu, untuk membantu peningkatan ketahanan sektor eksternal dan meningkatkan kapasitas ekonomi, kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada upaya meningkatkan porsi kredit kepada sektor-sektor produktif yang berorientasi ekspor dan sektor-sektor yang memproduksi barang substitusi impor. Dalam lingkup penguatan stabilitas sistem keuangan, upaya meningkatkan koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial antara Bank Indonesia dan OJK terus dilakukan untuk memastikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga dapat dijalankan secara efektif. Pengembangan keuangan syariah juga menjadi prioritas dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan. Pembangunan infrastruktur hukum, kelembagaan, dan pasar keuangan syariah beserta instrumen pendukungnya akan terus diperluas untuk meningkatkan kontribusi ekonomi berbasis prinsip syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi kebijakan sistem pembayaran nontunai, kebijakan tetap diarahkan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, perluasan akses, dan memperhatikan kepentingan nasional. Khusus untuk infrastruktur penyelesaian pembayaran nontunai di Bank Indonesia, kebijakan akan dilanjutkan dengan penyelesaian aplikasi Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II dan pengembangan aplikasi SKNBI-NG. Kebijakan peningkatan kualitas infrastruktur di luar Bank Indonesia dilanjutkan dengan tahapan pengembangan *National Domestic Switch/Domestic Payment Scheme* sebagai tahapan menuju NPG.

Kebijakan dan pengaturan untuk meningkatkan efisiensi pada infrastruktur perekonomian nasional melalui peningkatan efisiensi sistem pembayaran ritel, akan dilanjutkan dengan pengembangan kawasan LCS di berbagai wilayah, penggunaan uang elektronik untuk penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat (*government to people* atau disingkat G2P), perluasan penggunaan uang elektronik dengan fasilitas transfer antar pemegang uang elektronik (*person to person* atau disingkat P2P) dan peningkatan interoperabilitas serta interkoneksi.

Pelaksanaan peran Bank Indonesia dalam pengaturan sistem pembayaran nontunai, juga akan diwujudkan dengan penyusunan ketentuan untuk melindungi konsumen pengguna jasa sistem pembayaran, diikuti dengan penyediaan layanan pengaduan konsumen jasa sistem pembayaran di seluruh kantor Bank Indonesia. Di bidang pengaturan, Bank Indonesia juga akan menyusun ketentuan terkait penyelenggaraan pemroses transaksi pembayaran nontunai. Ketentuan ini mengatur kewajiban penyelenggara sarana pemrosesan dalam rangka prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko.

Ke depan, untuk lebih meningkatkan peran sistem pembayaran nontunai, Bank Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Pemerintah mengenai kemungkinan adanya pemberian insentif fiskal bagi kegiatan transaksi yang dilakukan secara nontunai.

Di bidang pengelolaan uang, kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia diarahkan pada upaya menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan berkualitas. Dalam menjaga ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, Bank Indonesia akan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL), serta *alignment* dengan Perum Peruri terkait peningkatan kapasitas cetak uang rupiah. Di

samping itu, Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penerbitan uang NKRI untuk pecahan tertentu pada tanggal 17 Agustus 2014 dan rencana penerbitan uang rupiah pecahan lainnya. Dalam rangka pemberantasan uang rupiah palsu, Bank Indonesia akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh unsur BOTASUPAL, yakni Badan Intelijen Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan.

Sebagai salah satu upaya menjaga kemandirian nasional, Bank Indonesia akan memperkuat kajian terkait rencana penggunaan komoditas pertanian lokal sebagai bahan baku kertas uang. Komoditas tersebut adalah abaca yang terbuat dari batang pisang abaca dan serat kapas. Bank Indonesia mengkaji pemanfaatan komoditas tersebut melalui pengalaman Bank of Japan dan Banko Sentral ng Pilipinas yang telah menggunakan bahan baku kertas uang lokal. Dalam hal ini, Bank Indonesia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Negara BUMN dan badan usaha di bawahnya guna mengkaji pemanfaatan infrastruktur pabrik kertas untuk memproduksi sampel bahan baku kertas uang dan memproduksi bahan baku kertas uang berskala besar.¹ Bank Indonesia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, terutama terkait upaya meningkatkan kapasitas budidaya abaca dan kapas lokal dalam jangka menengah, mengingat budidaya kapas lokal saat ini baru memenuhi 0,5% kebutuhan nasional.

Di samping kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran tersebut, Bank Indonesia juga akan memperkuat kebijakan terkait keuangan inklusif dan UMKM. Kebijakan keuangan inklusif berperan dalam mendorong intermediasi dan efisiensi perbankan sehingga berkontribusi pada penguatan stabilitas sistem keuangan dan mendukung kebijakan di bidang sistem pembayaran.

Kebijakan keuangan inklusif difokuskan pada lima strategi utama. Pertama, penguatan edukasi keuangan sebagai upaya mengubah perilaku pengelolaan keuangan, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kedua, peningkatan akses keuangan yang didukung penguatan infrastruktur sistem pembayaran, pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi, serta jaringan unit ekonomi lokal. Ketiga, perlindungan konsumen untuk memastikan terjaganya hak-hak masyarakat ketika memanfaatkan akses keuangan dan sistem pembayaran. Keempat, pengurangan informasi asimetris melalui penyediaan data profil

1 Badan usaha di bawah Kementerian BUMN tersebut adalah Perum Peruri, Pura Group, PT. Kertas Padalarang, dan PT. Kertas Lece.

keuangan masyarakat yang belum tersentuh perbankan dan data informasi komoditas. Kelima, pengaturan yang diterbitkan dalam kerangka stabilitas sistem keuangan maupun rekomendasi kebijakan kepada otoritas terkait.

Pada masa yang akan datang upaya pengembangan kebijakan keuangan inklusif akan dilakukan baik melalui inovasi maupun penyempurnaan proses bisnis yang sudah ada. Perluasan jangkauan kebijakan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan potensi daerah yang ada. Perluasan target edukasi keuangan akan difokuskan untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, baik penerima bantuan pemerintah maupun yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan dan daerah terpencil lainnya. Layanan Keuangan Digital akan terus dikembangkan sehingga pelayanan jasa keuangan menggunakan teknologi digital dapat mendukung efisiensi kegiatan operasional Bank sekaligus membantu perbaikan kondisi *unbanked*. Pengkayaan nilai tambah data pemetaan masyarakat *unbanked* dan data informasi komoditas terus dilakukan sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat baik bagi masyarakat *unbanked* maupun perbankan.

Berkaitan dengan pengembangan UMKM, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan penciptaan pusat-pusat ekonomi baru di daerah dalam kerangka pengendalian inflasi. Kebijakan tersebut akan diimplementasikan melalui empat strategi utama. Pertama, peningkatan kapasitas UMKM melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi klaster berbasis komoditas ketahanan pangan dan penciptaan wirausaha baru. Kedua, peningkatan akses keuangan UMKM melalui pembangunan infrastruktur keuangan, seperti pemeringkatan kredit untuk UMKM dan mendukung perluasan pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD), serta fasilitasi program pemerintah yang memberikan nilai tambah, diantaranya program sertifikasi tanah, asuransi ternak sapi dan resi gudang. Ketiga, penyediaan informasi, melalui penyediaan produk kajian mengenai potensi komoditas unggulan di tiap daerah dan pola pembiayaan, serta diseminasi informasi melalui *microsite* info UMKM di *website* Bank Indonesia. Keempat, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait termasuk Pemerintah Daerah, kementerian teknis, OJK serta lembaga internasional.

Bauran kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia dalam merespons berbagai tantangan perekonomian memerlukan koordinasi dengan berbagai otoritas terkait. Koordinasi diperlukan baik dalam upaya pengendalian inflasi, mitigasi dampak risiko fiskal, penguatan stabilitas sistem keuangan, maupun percepatan pelaksanaan reformasi struktural.

Dari sisi pengendalian harga, sejalan dengan arah kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, koordinasi dengan Pemerintah akan terus diperkuat. Koordinasi tersebut dilakukan di tingkat pusat dan daerah, baik dalam bentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPI) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi yang selama ini telah berjalan baik diarahkan secara intensif untuk mengatasi beberapa permasalahan utama, seperti menurunkan inflasi *volatile food*, meredam dampak depresiasi nilai tukar terhadap kenaikan harga barang-barang umum, serta menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi pasokan pangan. Melalui koordinasi kebijakan tersebut, inflasi diharapkan dapat diarahkan pada kisaran sasarannya.

Dalam ruang lingkup penguatan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia dan OJK akan memperkuat kerjasama dan koordinasi dalam rangka menciptakan stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Penguatan koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial cukup penting guna mencegah peningkatan *regulatory cost*, menghindari *regulatory arbitrage*, dan meningkatkan kualitas *Crisis Management Protocol* (CMP). Dalam konteks kebijakan di sektor keuangan, OJK akan tetap menjaga konsistensi regulasi dan supervisi perbankan serta kebijakan/komitmen yang telah disepakati dengan industri perbankan sebelumnya. Namun, koordinasi antarotoritas tersebut masih perlu diperkuat dengan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dalam pencegahan dan penanganan krisis. Ini mutlak diperlukan untuk memberi kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan krisis. Oleh karena itu, penerbitan undang-undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan dipandang perlu untuk memayungi kerjasama antarotoritas agar menjadi lebih baik. Melalui kerjasama dan koordinasi tersebut, diharapkan sistem keuangan dapat berjalan lebih efisien sehingga mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan lebih baik dan mampu meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Upaya penguatan koordinasi terkait sistem keuangan telah dilakukan dengan ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bank Indonesia dan OJK pada 18 Oktober 2013. SKB tersebut memuat komitmen untuk memastikan bahwa transisi pengalihan fungsi pengawasan mikroprudensial bank dari Bank Indonesia kepada OJK berjalan dengan baik serta tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga dapat dijalankan secara efektif. Selanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia

kepada OJK terhitung sejak 31 Desember 2013. Sejak saat itu pula, pengawasan mikroprudensial dilakukan oleh OJK, sementara pengawasan makroprudensial tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan OJK.

Dengan dukungan berbagai kebijakan tersebut, pada tahun 2014 stabilitas ekonomi diperkirakan akan semakin membaik sehingga dapat memberikan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka yang lebih panjang.

*Sovereign credit ratings*¹ merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan akses sebuah negara, termasuk Indonesia, ke pasar modal internasional. Selain itu, *sovereign credit ratings* merupakan faktor determinan utama biaya pinjaman suatu negara di pasar modal internasional. Pada umumnya *sovereign ratings* akan menjadi *benchmark* peringkat yang ditetapkan kepada bank dan perusahaan domestik, sehingga akan memengaruhi pembiayaan untuk sektor swasta.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa baik variabel makroekonomi, eksternal, sektor pemerintahan maupun risiko politik berpengaruh terhadap kemampuan suatu negara mencapai *investment grade*²(Tabel 1). Hasil empiris menunjukkan bahwa tingkat utang saat ini berpengaruh negatif terhadap pencapaian *investment grade (IG)*. Namun demikian, studi empiris tersebut tidak memberi bobot yang signifikan terhadap Utang Luar Negeri (ULN) swasta. Selain itu, lembaga pemeringkat terindikasi memperhitungkan risiko yang lebih besar untuk utang publik eksternal daripada utang publik domestik.

Performa kredit rating Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kecuali pada krisis ekonomi 1997 (*default*). Saat ini Indonesia telah mendapatkan status *Investment Grade* dari dua lembaga pemeringkat yaitu Fitch's dan Moody's. Fitch's memberikan rating *Investment grade* (BBB-) pada 15 Desember 2011 dan Moody's (Baa3) pada 18 Januari 2012. Sedangkan S&P masih memberikan rating BB+ dengan *outlook stable* yang berarti

1 Merupakan ukuran kualitatif yang bersifat *forward-looking* dari kemungkinan terjadinya gagal bayar (*default*) yang dielaborasi oleh lembaga-lembaga pemeringkat. Elaborasi tersebut merupakan rangkuman asesmen mengenai kemampuan pemerintahan sebuah negara dalam membayar semua kewajiban finansialnya dengan jumlah yang sesuai dan tepat pada waktunya.

2 Jaramillo, *Determinant of Investment Grade Status in Emerging Markets*, IMF Working Paper, Oktober 2010.

Tabel 1. Variabel Investment Grade

Variabel makroekonomi		Sektor pemerintah	
PDB per kapita	+	Keseimbangan primer	+
Pertumbuhan PDB riil	+	Utang pemerintah eksternal*	-
Pertumbuhan PDB potensial	+	Utang pemerintah domestik*	-
Inflasi	-		
Tingkat pengangguran	-	Pendalaman sektor keuangan	
		Jumlah uang beredar (M2)*	+
Sektor eksternal			
Ekspor*	+	Lainnya	
Keseimbangan Transaksi Berjalan*	-	Risiko politik**	+
Utang swasta eksternal*	-	Sejarah <i>default</i>	-
Cadangan devisa*	+		

* Rasio terhadap PDB

** Index tinggi berarti risiko lebih rendah

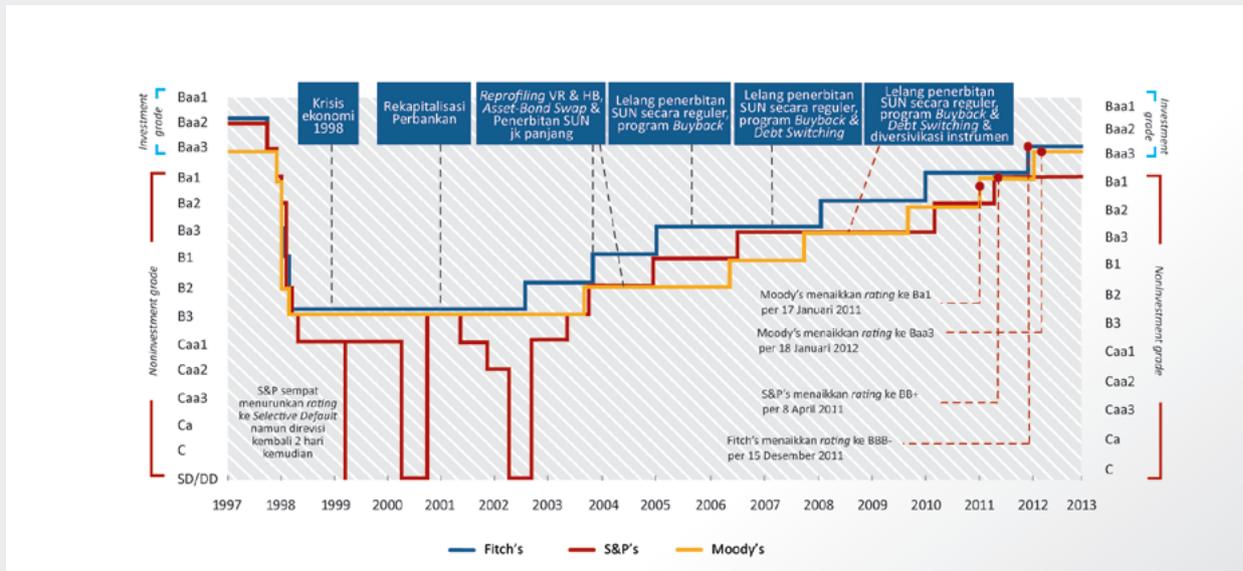
Sumber: IMF

*non investment grade*³ (Grafik 1). Posisi Indonesia berada di level paling bawah dari IG (*low medium investment grade*) sehingga penurunan *rating* akan membuat posisi Indonesia kembali ke *speculative grade* dan akan berdampak signifikan terhadap *capital flows*.

Meskipun beberapa variabel makroekonomi menunjukkan perbaikan secara umum laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam tren yang menurun. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mencapai 5,8% atau lebih rendah dari tahun 2011⁴ yang mencapai 6,5%. Selain itu, rasio ekspor terhadap PDB tahun 2013 menurun menjadi 23,7% dari sebelumnya 26,4% di tahun 2011. Namun beberapa indikator makro lainnya masih menunjukan perbaikan, diantaranya nominal

3 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan. "Profil Utang Pemerintah Pusat: Edisi Oktober 2013," Oktober 2013.

4 Tahun 2011 digunakan sebagai referensi mengingat pada tahun tersebut lembaga pemeringkat menaikkan *credit rating* Indonesia.



Grafik 1. Perkembangan Sovereign Credit Rating Indonesia

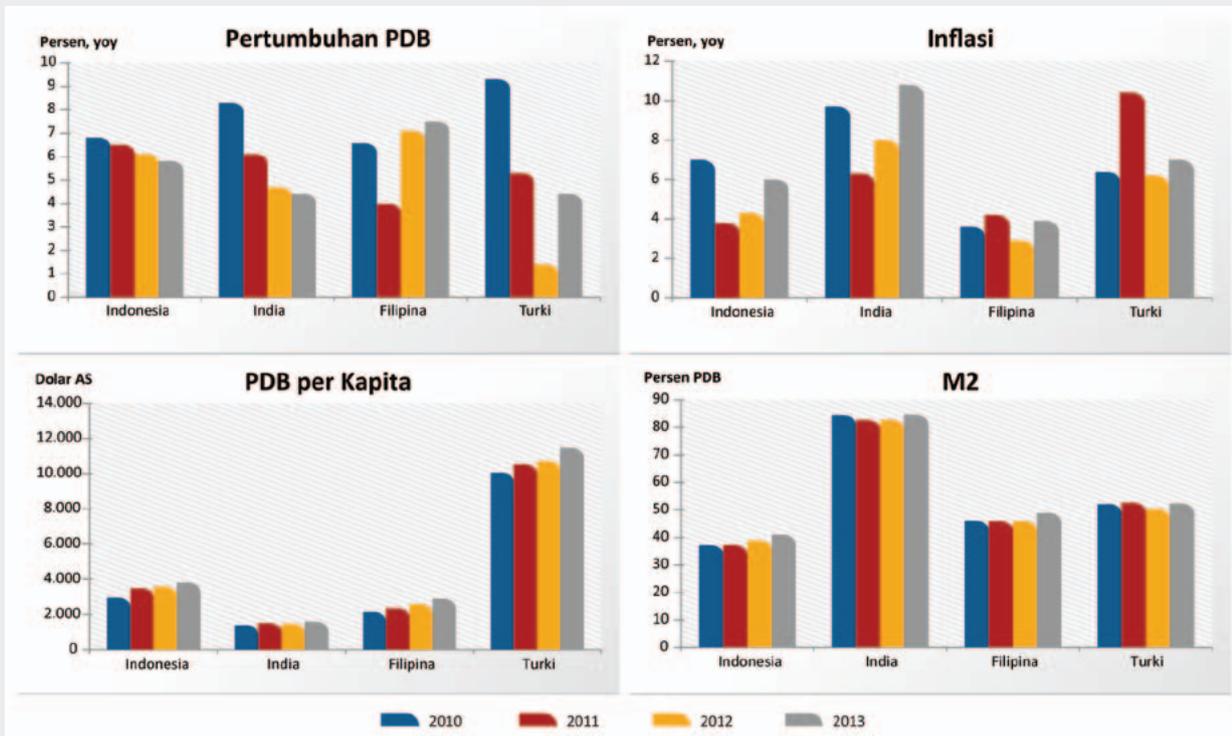
PDB per kapita dan rasio M2 yang meningkat. Meningkatnya PDB per kapita menunjukkan bahwa masih terbukanya ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya. Di sisi lain, rasio M2 terhadap PDB yang meningkat mencerminkan perbaikan di sisi kedalaman dan efisiensi pasar finansial domestik. Dari sisi eksternal, sektor publik terindikasi mengalami kemajuan terutama pada rasio hutang pemerintah eksternal terhadap PDB yang terus menurun. Dari sisi fiskal, tekanan terindikasi pada keseimbangan primer APBN. Keseimbangan primer di 2013 mencapai -1,1% terhadap PDB, lebih besar dibandingkan defisit tahun 2012 dan kondisi tahun 2011 yang masih positif. Hal tersebut mengindikasikan semakin rendahnya kemampuan pendapatan negara untuk menutupi pengeluarannya.

Selain dari sisi domestik, posisi Indonesia dibandingkan dengan *peer*-nya juga diindikasikan berpengaruh terhadap *credit rating* Indonesia pada masa mendatang. Beberapa negara EM yang mempunyai *grade* yang sama (BBB+/Baa3) dengan

Indonesia adalah India, Turki, dan Filipina⁵. Ketiga negara tersebut termasuk Indonesia tergabung dalam *lower medium investment grade*, satu tingkat di atas *non investment grade* atau tingkat terendah dalam *investment grade*.

Secara umum, indikator makroekonomi Indonesia masih relatif stabil dibandingkan dengan India dan Turki meskipun lebih rendah dari Filipina. Dibandingkan dengan Turki dan India, Indonesia tidak hanya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inflasi yang lebih rendah, namun juga relatif lebih stabil. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan India dan Filipina. Pertumbuhan PDB per kapita yang positif mengindikasikan masih terbukanya ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajaknya. Namun jika dilihat dari indikator M2 terhadap PDB, menunjukkan bahwa dalam hal pendalaman pasar Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Dengan kata lain, efisiensi makro di negara lain masih jauh lebih baik dibanding Indonesia (Grafik 2).

5 Baru masuk IG pada tahun 2013.



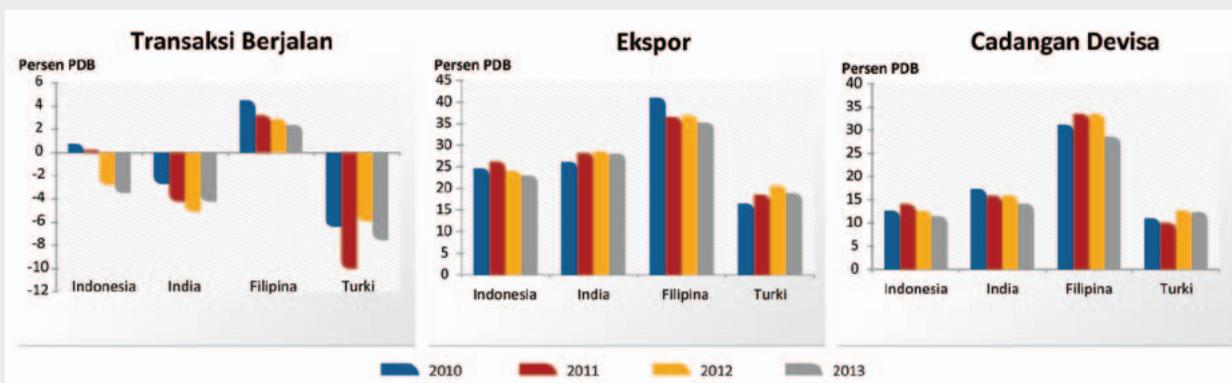
Grafik 2. Perkembangan Indikator Makroekonomi

Dari sisi eksternal, mayoritas *peer countries* mempunyai tekanan eksternal yang meningkat. Mayoritas negara *peer* memiliki defisit transaksi berjalan, kecuali Filipina yang mampu mempertahankan surplus transaksi berjalan. Selain itu ekspor dan cadangan devisa *peer countries* cenderung menurun (Grafik 3).

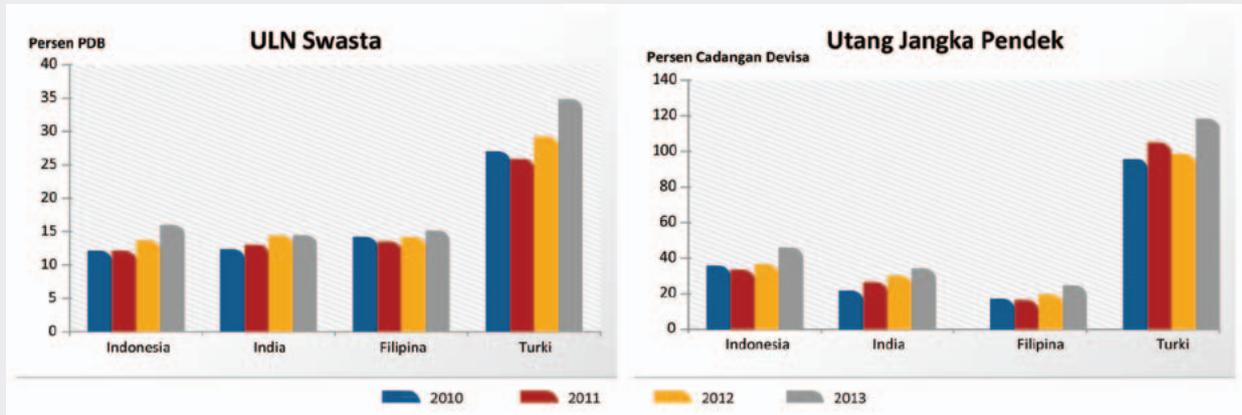
Sementara itu, dari sisi *sovereign credit* kemampuan membayar Indonesia masih

relatif terjaga dibandingkan *peer countries*. Hal tersebut terlihat dari keadaan semua negara yang mengalami peningkatan pada sektor ULN swasta. Selain itu tekanan pada ULN jangka pendek juga cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya rasio utang jangka pendek terhadap PDB dan cadangan devisa (Grafik 4).

Indikator sektor pemerintah Indonesia juga menunjukkan posisi Indonesia lebih aman



Grafik 3. Perkembangan Indikator Eksternal

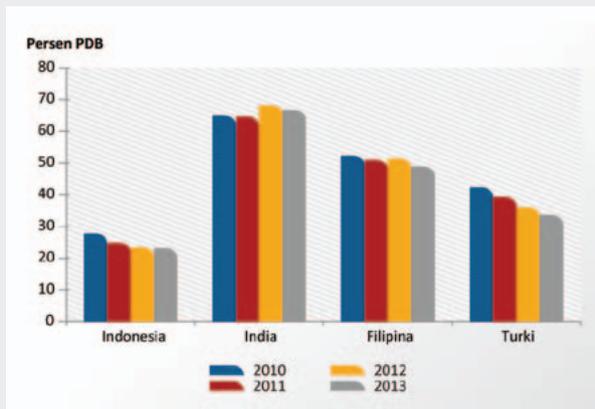


Grafik 4. Perkembangan Rasio Utang Jangka Pendek

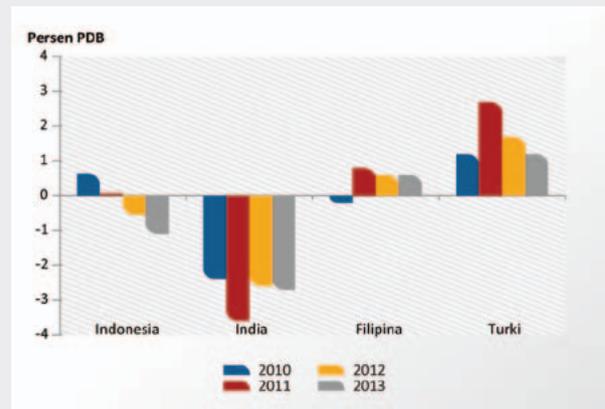
dibandingkan *peer*-nya. Di sisi utang, rasio total utang pemerintah terhadap PDB Indonesia cenderung paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko *default* pemerintah cenderung rendah. Namun demikian, struktur utang pemerintah masih lebih banyak dengan denominasi mata uang asing sehingga rasio ULN pemerintah terhadap PDB masih cukup tinggi. Selain itu, rendahnya rasio utang domestik diindikasikan mencerminkan masih dangkalnya struktur pasar modal dalam

negeri sehingga sumber pembiayaan domestik terbatas (Grafik 5).

Sementara itu, kondisi fiskal dan politik Indonesia masih cukup aman. Dibandingkan India, kondisi defisit keseimbangan primer Indonesia masih terhitung rendah. Di tahun 2013 defisit keseimbangan primer India mencapai -2,7% terhadap PDB, yang tertinggi diantara *peer countries*, sedangkan Indonesia hanya mencapai -1,1% terhadap PDB (Grafik 6).



Grafik 5. Perkembangan Utang Pemerintah



Grafik 6. Keseimbangan Primer



Prospek Ekonomi Jangka Menengah dan Kebijakan Reformasi Struktural

Prospek perekonomian dalam jangka menengah diperkirakan akan berada dalam tren membaik seiring dengan implementasi kebijakan-kebijakan reformasi struktural di berbagai bidang. Bank Indonesia akan terus berkontribusi sesuai bidang tugasnya dan memantapkan koordinasi dengan Pemerintah dalam mempercepat implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam pandangan Bank Indonesia, reformasi struktural perlu ditempuh guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi dengan laju inflasi yang lebih rendah dan postur transaksi berjalan yang lebih sehat. Namun, prognosa ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural yang saat ini masih menyelimuti perekonomian domestik. Beberapa tantangan yang mengemuka terkait dengan struktur pembiayaan, struktur produksi, termasuk ketahanan energi dan pangan serta dampaknya pada pengelolaan subsidi di APBN, dan penguatan modal dasar pembangunan. Berbagai langkah reformasi struktural telah ditempuh oleh Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengatasi tantangan struktural tersebut. Terlepas dari capaian yang telah diraih, percepatan implementasi berbagai kebijakan yang telah dicanangkan masih diperlukan, meliputi kebijakan pendalaman pasar keuangan domestik, kebijakan di sisi produksi, dan upaya mengelola subsidi BBM secara optimal guna memberi ruang fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan percepatan tersebut, diperkirakan Indonesia dapat terhindar dari risiko jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).

Kebijakan struktural pendalaman pasar keuangan berhubungan dengan upaya mendukung pembiayaan pembangunan yang lebih berkesinambungan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan OJK guna memastikan kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan tetap stabil sebagai syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Kebijakan struktural di sisi produksi perlu diarahkan untuk membangun ketersediaan modal dasar bagi bertumbuh kembangnya industri-industri domestik yang berdaya saing global. Terkait hal ini, kebijakan-kebijakan yang perlu dipercepat implementasinya adalah penyediaan infrastruktur konektivitas, baik fisik maupun digital, yang berkualitas dan efisien, modal manusia handal yang berdaya-saing global, serta iklim usaha dan institusi yang kondusif bagi partisipasi swasta yang lebih luas dalam pembangunan. Melalui percepatan tersebut, diharapkan sektor produksi domestik dapat lebih handal dan terintegrasi ke rantai produksi global. Selain itu, kebijakan-kebijakan untuk memperkuat kedaulatan energi dan pangan sebagai input-input produksi yang penting bagi proses industrialisasi juga perlu terus dipercepat implementasinya.

Sementara itu, kebijakan struktural terkait pengelolaan subsidi BBM cukup penting karena akan memengaruhi berbagai aspek struktural lainnya. Pada satu sisi,

pengelolaan subsidi BBM yang optimal akan dapat memastikan tersedianya ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan. Pada sisi lain, pengelolaan subsidi BBM akan berkontribusi pada penguatan modal-modal dasar bagi pertumbuhan sektor industri domestik yang berdaya-saing global dan mandiri.

15.1. Prospek Perekonomian Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat meningkat secara bertahap menuju lintasan yang lebih tinggi secara berkesinambungan. Hal ini didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan akan terus membaik dan ekspektasi adanya percepatan implementasi berbagai kebijakan struktural sesuai rencana yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Dari sisi global, prospek perekonomian Indonesia dalam jangka menengah didukung oleh perekonomian global yang diperkirakan akan terus pulih bertahap. Sejalan dengan kondisi ekonomi global yang terus membaik tersebut, perekonomian negara maju diperkirakan akan sepenuhnya keluar dari ancaman deflasi. Harga minyak dunia diperkirakan akan kembali meningkat, sementara harga komoditas nonmigas pulih meski terbatas.

Dari sisi domestik, prospek ekonomi Indonesia yang membaik ditopang oleh ekspektasi berlanjutnya penerapan serangkaian kebijakan struktural yang ditujukan untuk memperbaiki fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pemerintah diharapkan akan terus melanjutkan upaya penguatan ketersediaan modal-modal dasar pembangunan yaitu infrastruktur, modal manusia, institusi dan teknologi. Penguatan ini ditempuh melalui implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III 2015-2019 dan Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025. Pemerintah juga diharapkan akan terus melanjutkan implementasi berbagai kebijakan, baik fiskal maupun sektoral, dalam rangka mendorong peran sektor swasta yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal juga akan diarahkan pada penguatan pembiayaan pembangunan dalam rangka menopang industrialisasi.

Apabila sejumlah rencana tersebut berjalan optimal, ketersediaan dan kualitas modal-modal dasar pembangunan diperkirakan akan meningkat secara

signifikan dan semakin tersebar, sehingga mampu mendorong pengembangan seluruh koridor ekonomi di berbagai wilayah di Nusantara. Keberhasilan implementasi program-program tersebut selanjutnya diperkirakan akan secara bertahap mendorong penguatan kapabilitas dan kapasitas sektor industri domestik sehingga mampu menghadapi tantangan persaingan global. Partisipasi sektor swasta domestik, baik PMA maupun PMDN, dalam derap laju pembangunan ekonomi juga diperkirakan akan semakin meningkat dan meluas. Sejalan dengan kondisi sektor industri yang semakin handal, pertumbuhan industri barang-barang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor diperkirakan akan semakin meningkat, dan industri bahan baku dan barang-barang antara domestik semakin berkembang. Perbaikan pada struktur produksi ini selanjutnya diperkirakan akan tercermin pada pertumbuhan ekspor sektor manufaktur dan penggunaan bahan baku dan barang manufaktur antara dari sumber domestik yang semakin meningkat, yang selanjutnya mendukung perbaikan postur keseimbangan eksternal.

Dengan asumsi global dan domestik di atas, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai 6,5% dengan inflasi yang rendah dan rasio defisit transaksi berjalan terhadap PDB yang menurun. Tingkat produktivitas diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi sebagai cerminan dari perbaikan kapabilitas dan kapasitas di sektor industri. Struktur ekspor diperkirakan akan mulai bergeser dari berbasis komoditas primer menjadi komoditas yang lebih bernilai tambah, padat modal manusia, padat teknologi, dan padat muatan inovasi. Sementara itu, permintaan bahan baku dan barang manufaktur antara untuk kegiatan produksi barang akhir akan secara bertahap semakin mampu dipenuhi oleh produsen domestik. Produktivitas perekonomian yang membaik dan konsistensi otoritas fiskal, moneter dan jasa keuangan dalam memelihara stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan, diperkirakan akan menopang kinerja keseimbangan internal yang tercermin pada laju inflasi yang terkendali pada kisaran sasaran jangka menengahnya sebesar $3,5\% \pm 1\%$.

Dengan prognosa seperti di atas, pendapatan per kapita yang diukur dalam konstan dolar AS diperkirakan akan terus meningkat dan tingkat ketimpangan pendapatan dalam perekonomian secara berangsur mulai menurun. Prospek ini juga dapat berarti probabilitas perekonomian Indonesia untuk jatuh ke dalam jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) semakin kecil.

15.2. Tantangan Perekonomian Jangka Menengah

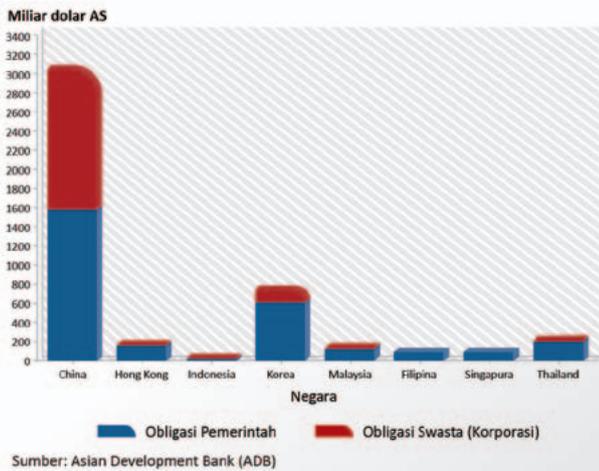
Di tengah prognosa yang optimis tersebut, perlu pula disampaikan berbagai tantangan yang akan dihadapi, baik yang bersumber dari luar maupun dalam negeri. Dari luar negeri, proses pemulihan ekonomi global bisa saja berjalan tidak sesuai harapan, dengan pemulihan pertumbuhan berbagai kawasan di dunia yang belum berimbang dan masih mengandung risiko untuk kembali jatuh dalam kelesuan (*muddling through*). Jika risiko ini terealisasi, volume permintaan terhadap barang-barang ekspor Indonesia bisa saja menjadi lebih rendah dari perkiraan semula. Kondisi ini juga dapat menghambat pemulihan harga komoditas nonmigas sehingga berpotensi menahan kinerja pertumbuhan ekspor. Semua faktor risiko global ini selanjutnya dapat menurunkan kemampuan perekonomian domestik untuk melintas pada laju pertumbuhan pendapatan dan permintaan domestik riil yang lebih tinggi.

Dari dalam negeri, beberapa tantangan struktural juga masih mengemuka dan perlu segera ditangani. Tantangan pertama terkait pembiayaan pembangunan yang belum optimal sebagai dampak pasar keuangan domestik yang belum dalam. Tantangan kedua berhubungan dengan kondisi sektor riil yang masih memerlukan peningkatan daya saing dan kehandalan dari sisi produksi. Terkait ini termasuk juga tantangan mengenai ketahanan sektor energi dan pangan serta pengaruhnya kepada pengelolaan subsidi dalam APBN, terutama subsidi BBM. Tantangan terakhir, berkaitan dengan upaya untuk memperkuat berbagai modal dasar pembangunan seperti infrastruktur konektivitas fisik dan digital, sumber daya manusia dan kapasitas penyerapan teknologi, serta iklim usaha dan kelembagaan.

Tantangan Struktur Pembiayaan

Tantangan struktur pembiayaan memang perlu terus mendapat perhatian karena dapat mengganggu kesinambungan dan kualitas kegiatan ekonomi. Kondisi saat ini menunjukkan beberapa struktur yang kurang menguntungkan dalam pembiayaan perekonomian Indonesia, antara lain biaya dana yang tinggi. Selain itu, ketergantungan pembiayaan jangka pendek pada investor portofolio asing juga masih besar, dan sumber dana jangka panjang masih terbatas.

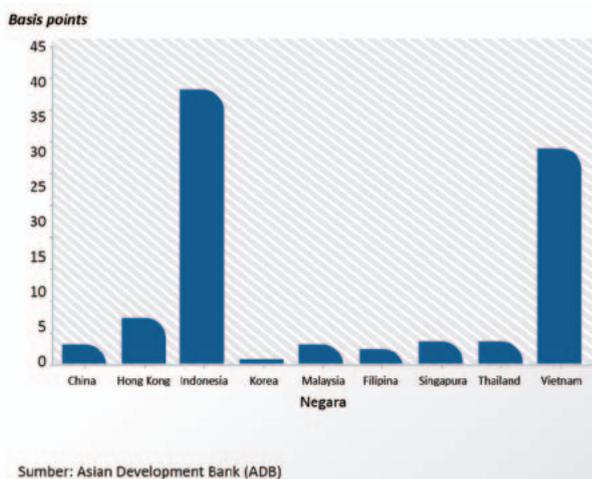
Tantangan pertama terkait sumber pembiayaan ialah biaya modal yang masih cukup tinggi. Biaya kapital



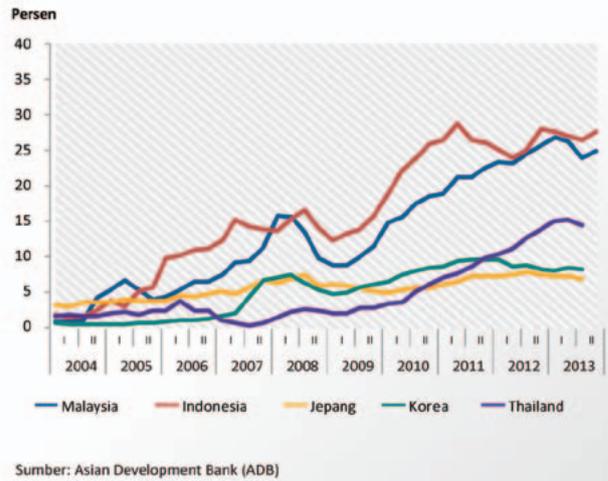
Grafik 15.1. Volume Perdagangan Obligasi di Pasar Sekunder

yang tinggi tercermin pada *spread* suku bunga kredit dan deposito yang relatif lebar. Di pasar obligasi, volume perdagangan obligasi juga masih rendah bila dibandingkan dengan volume di negara lain (Grafik 15.1). Selain itu, *bid-ask spread* obligasi Pemerintah juga lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di negara lain (Grafik 15.2).

Di tengah kondisi biaya dana yang tinggi tersebut, ketersediaan sumber pembiayaan ekonomi domestik masih sangat dipengaruhi oleh perilaku investor asing. Faktor *return* sangat menentukan motivasi investor asing dalam berinvestasi di pasar keuangan regional, termasuk Indonesia. Berdasarkan kepemilikan, pangsa investor asing di SBN dan saham masih cukup besar



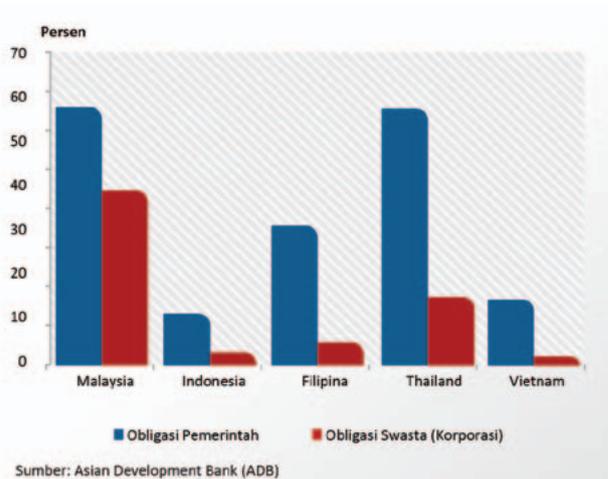
Grafik 15.2. Bid-Ask Spread Obligasi Pemerintah



Grafik 15.3. Perbandingan Pangsa Kepemilikan Asing pada Obligasi Pemerintah

(Grafik 15.3). Kondisi ini seringkali menjadi sumber volatilitas harga di pasar sekunder.

Pembiayaan perekonomian juga dihadapkan pada masih terbatasnya sumber dana yang bersifat jangka panjang. Pembiayaan melalui pasar obligasi dan saham masih sangat terbatas, bahkan relatif tertinggal dibandingkan dengan kawasan (Grafik 15.4 dan Grafik 15.5). Kapasitas dan likuiditas pasar obligasi korporasi masih rendah dan tertinggal. Sementara itu, tingkat partisipasi dana pensiun/asuransi yang merupakan pemberi pinjaman jangka panjang juga masih rendah, tercermin dari terbatasnya dana masyarakat yang dapat dihimpun melalui program pensiun, asuransi, dan reksa dana (Grafik 15.6).

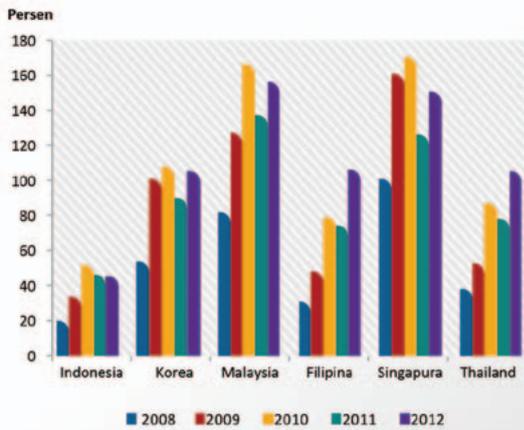


Grafik 15.4. Pangsa Kapasitas Pasar Obligasi terhadap PDB

Tabel 15.1. Perbandingan Pangsa Transaksi Valas Domestik dengan Negara Lain

	Spot	Forward	Swap	Lainnya
ASEAN	44%	13%	39%	4%
Negara Maju	32%	9%	55%	4%
Indonesia	67%	4%	28%	1%
Thailand	40%	12%	46%	2%
Malaysia	45%	25%	27%	2%
Singapura	27%	16%	45%	12%
Turki	33%	15%	41%	12%

Sumber: Bank for International Settlements (BIS)



Sumber: Asian Development Bank (ADB)

Grafik 15.5. Pangsa Kapitalisasi Pasar Saham terhadap PDB

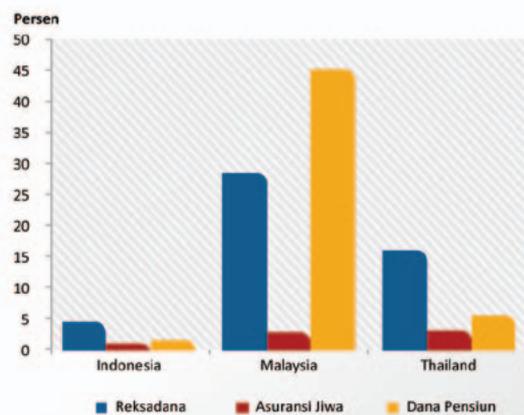
Sementara itu, pasar uang domestik yang antara lain terdiri dari pasar uang rupiah dan pasar uang valas, berada dalam kondisi yang masih dangkal dan belum berkembang. Kondisi ini dipengaruhi oleh permasalahan struktural yang dihadapi masing-masing pasar tersebut, sehingga perlu segera direspons oleh kebijakan reformasi struktural.

Di pasar valas, perkembangan pasar valas domestik juga masih dangkal dan tertinggal bila dibandingkan dengan kondisi negara kawasan. Menurut survei Bank for International Settlements (2014), rata-rata volume transaksi valas di Indonesia berkisar 5 miliar dolar AS per hari, lebih rendah dari kawasan, seperti Malaysia dan Thailand yang telah mencapai 11-13 miliar dolar AS

per hari, Turki 27 miliar dolar AS, Korea 48 miliar dolar AS, dan Singapura 383 miliar dolar AS per hari. Transaksi antar-pelaku di pasar domestik juga masih didominasi oleh transaksi spot, dengan pangsa mencapai 67% dari total transaksi. Sementara itu, transaksi derivatif, sebagai salah satu sarana pengelolaan risiko (lindung nilai) pelaku pasar, cenderung kurang berkembang. Di negara dengan pasar valas yang lebih maju, transaksi derivatif seperti *foreign exchange swap* cenderung lebih dominan, yaitu dengan pangsa 55%, sementara transaksi spot hanya mencapai 32% (Tabel 15.1).

Di pasar uang valas antarbank (PUAB valas), rata-rata volume transaksi PUAB valas domestik sepanjang 2009-2013 sekitar 300-400 juta dolar AS per hari. Penempatan ini jauh lebih rendah, yakni hanya sekitar 15%, dibanding penempatan valas di pasar uang luar negeri yang mencapai 2,5 miliar dolar AS per hari (Tabel 15.2). Fenomena ini dipengaruhi oleh *credit line* antar-counterparty pasar uang valas di domestik yang masih sangat terbatas, sehingga mendorong banyak pelaku pasar untuk menempatkan dana valasnya di luar negeri.

Pasar valas yang relatif dangkal juga dipengaruhi struktur pasar yang cenderung *net demand*, seiring dengan tingginya kebutuhan valas pelaku pasar domestik yang tidak diimbangi oleh pasokan valas yang memadai. Permasalahan struktural di pasar valas domestik ini dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya adalah keengganan eksportir untuk menempatkan dana valasnya di perbankan domestik karena masalah perpajakan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pasar valas domestik mengalami ekse permintaan valas sebesar 28 miliar dolar AS, meskipun sempat mencatat *net supply* 14,2 miliar dolar AS pada tahun 2009-2010 akibat besarnya aliran modal masuk sejalan dengan kebijakan *quantitative easing* oleh the Fed.



Ket: Reksadana: INA (2004), MAS (2011), THA (2009); Asuransi Jiwa: INA (2010), MAS (2011), THA (2011); Dana Pensiun: INA (2011), MAS (2008), THA (2010)

Grafik 15.6. Rasio Aset Investasi terhadap PDB

Tabel 15.2. Rata-rata Harian Transaksi PUAB Valas DN dan PUAB Valas LN

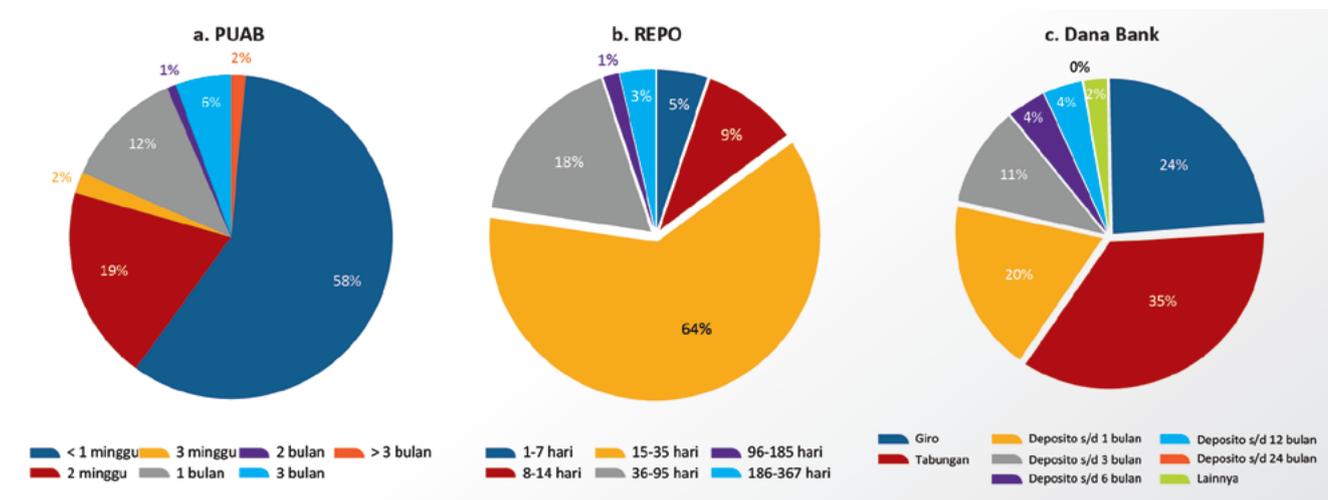
Ribu dolar AS

	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
PUAB DN	118.997	180.427	476.654	522.967	358.033	331.016
PUAB LN	2.594.719	2.726.076	1.677.404	1.960.884	1.999.974	2.191.812
% pangsa	4,59%	6,62%	28,3%	26,67%	17,9%	15,1%

Di pasar uang rupiah, kondisi eksek likuiditas struktural pada sistem perbankan serta pasar yang cenderung tersegmentasi telah menyebabkan kurang berkembangnya transaksi antarpelaku dan mendorong bank lebih banyak menempatkan dananya di bank sentral. Posisi PUAB pada bulan Desember 2013 tercatat Rp30 triliun atau jauh lebih rendah dibandingkan *outstanding* operasi moneter yang volumenya mencapai Rp273,5 triliun pada periode yang sama. Di tengah kondisi *credit line* dan *credit limit* yang terbatas, transaksi repo antarpelaku pasar masih belum berjalan dengan efisien. Repo *rate* yang lebih tinggi dari suku bunga *uncollateralized loan* mendorong semakin lambatnya perkembangan transaksi dimaksud. Transaksi *repurchase agreement* (repo), yang tergolong dalam *collateralized loan*, volumenya hanya sekitar Rp306 miliar per hari, dalam tahun laporan, jauh lebih rendah dari transaksi PUAB yang *uncollateralized* yang rata-rata hariannya sebesar Rp10,7 triliun (Tabel 15.3). Banyak faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, antara lain berkaitan dengan belum tersedianya standarisasi kontrak repo, prosedur administrasi dan operasional yang lebih rumit, stigma negatif terkait transaksi repo, masalah perpajakan

(*double taxation*), maupun *lack of confidence* terhadap kemampuan mengeksekusi agunan yang antara lain berhubungan dengan isu akuntansi.

Dari sisi jenis transaksi, tenor transaksi di pasar uang rupiah masih didominasi oleh tenor berjangka pendek. Hingga saat ini, tenor transaksi PUAB didominasi oleh tenor kurang dari 7 hari, yakni dengan pangsa hampir 60% (Grafik 15.7a). Sementara itu, tenor transaksi repo didominasi oleh tenor berjangka 15 hari hingga 1 bulan (Grafik 15.7b). Penempatan dana di pasar uang yang berjangka pendek tersebut dipengaruhi profil sumber dana perbankan yang didominasi dana pihak ketiga perbankan (DPK) yang juga berjangka pendek. Profil sumber dana perbankan domestik yang berasal dari DPK didominasi oleh tenor sampai dengan 1 bulan dengan porsi hampir mencapai 80% dari total DPK (Grafik 15.7c). Walaupun bank memiliki konsep *core-deposit*, dalam rangka manajemen *short-term liquidity* untuk menghindari *mismatch* ketika terjadi penarikan dana nasabah secara tiba-tiba, bank lebih banyak melakukan penempatan dana kepada bank lain dengan tenor pendek.



Grafik 15.7. Struktur Dana di PUAB, Repo dan Dana Bank

Tabel 15.3. Rata-rata Harian Volume Transaksi di Pasar Uang Rupiah

	Miliar Rupiah					
	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
PUAB	8.947,93	9.097,39	10.640,4	9.344,27	10.770,21	9.760,04
Repo	134,22	305,8	251,5	230	306,31	245,57

Perkembangan pasar keuangan domestik yang relatif lambat tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan instrumen, regulasi, infrastruktur, dan pemahaman pelaku pasar. Selain belum dalamnya pasar keuangan domestik, perekonomian domestik masih menghadapi tantangan terkait dengan adanya fragmentasi eksekusi likuiditas rupiah yang bersifat struktural di sektor perbankan. Secara historis, sekitar 60-70% eksekusi likuiditas terkonsentrasi hanya pada 10 bank. Fragmentasi eksekusi likuiditas tersebut juga ditambah dengan adanya segmentasi pasar. Seringkali kelompok bank hanya bertransaksi dengan kelompoknya sendiri, terutama pada kelompok Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum Swasta Nasional.

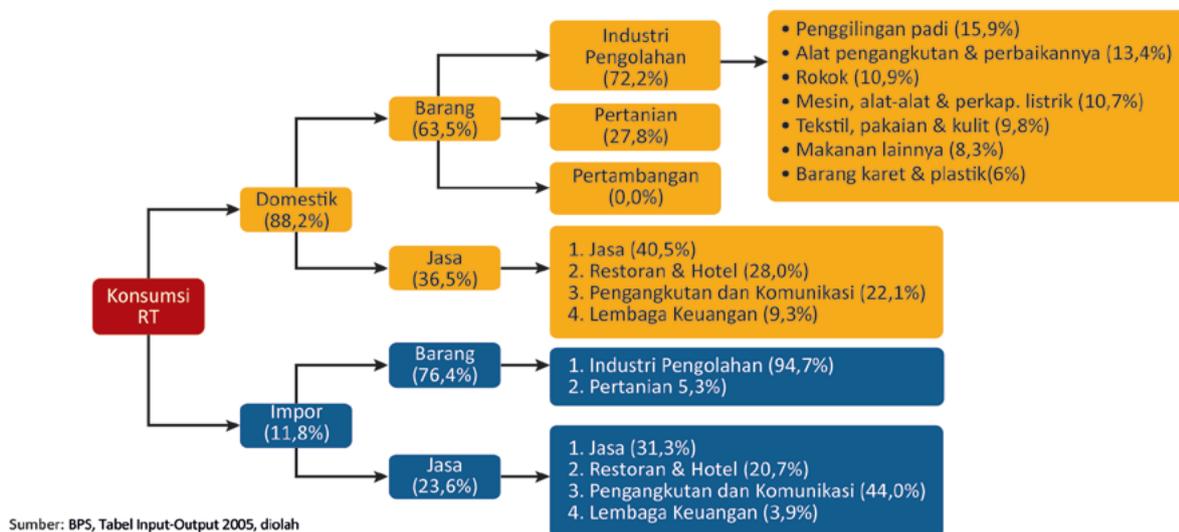
Tantangan Struktur Produksi Domestik

Tantangan struktural berikutnya berkaitan dengan kelemahan pada struktur produksi yang mengurangi daya saing dan kemandirian ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan di sisi produksi ini semakin mengemuka

akibat tertinggalnya kemampuan sisi penawaran dalam memenuhi permintaan kelas menengah yang semakin kompleks. Dari sisi permintaan, perkembangan kelas menengah telah mengubah struktur permintaan agregat. Sementara itu, dari sisi penawaran, kapabilitas industri dan kapasitas produksi yang masih terbatas menimbulkan persoalan daya saing dan kemandirian yang selanjutnya tercermin pada kinerja transaksi berjalan yang memburuk.

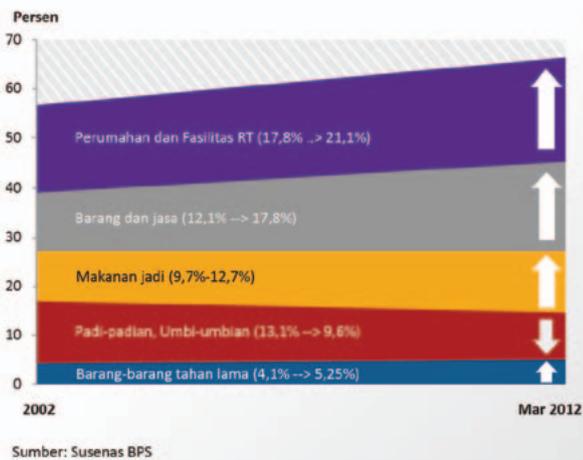
Keterbatasan sisi penawaran dalam merespons perkembangan permintaan salah satunya disebabkan oleh pesatnya perkembangan kelas menengah yang menggeser struktur permintaan barang dan jasa dalam perekonomian ke arah yang lebih bernilai tambah tinggi dan beragam. Hal ini terlihat misalnya pada struktur permintaan atas barang-barang konsumsi oleh penduduk dalam 10 tahun terakhir. Proporsi konsumsi barang-barang tidak tahan lama (*nondurables*) hasil pertanian semakin berkurang, sementara proporsi permintaan untuk makanan olahan, perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang-barang tahan lama (*durables*), dan aneka barang dan jasa di dalam komposisi konsumsi penduduk semakin meningkat (Grafik 15.8). Hasil analisis terhadap data input/output juga menunjukkan bahwa sebagian besar konsumsi rumah tangga adalah barang-barang hasil manufaktur, sehingga semakin penting untuk memastikan bahwa sektor manufaktur domestik mampu memenuhi permintaan masyarakat (Gambar 15.1).

Pergeseran struktur permintaan agregat tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pergeseran pada struktur produksi di sisi penawaran. Struktur produksi dalam negeri dalam



Sumber: BPS, Tabel Input-Output 2005, diolah

Gambar 15.1. Struktur Konsumsi Masyarakat

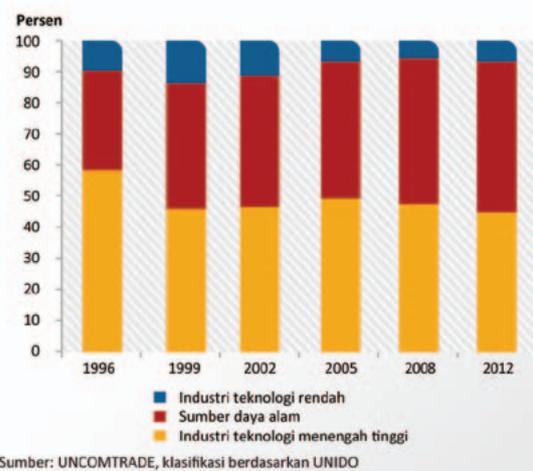


Grafik 15.8. Perubahan Pola Konsumsi Penduduk

banyak aspeknya masih berbasis ekstraksi sumber daya alam (SDA) primer dan industri padat karya berteknologi rendah, sementara ekspansi kelas menengah yang mendorong peningkatan keragaman permintaan barang dan jasa membutuhkan basis keunggulan dan kapabilitas industri yang meningkat. Ketidakseimbangan struktural antara sisi permintaan dan penawaran tersebut dalam dua tahun terakhir banyak diserap oleh impor barang-barang hasil industri berteknologi menengah dan tinggi (Grafik 15.9), terutama barang-barang modal dan antara. Permintaan teknologi yang besar dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia terutama untuk mesin-mesin dan peralatan listrik, alat-alat transportasi, dan alat-alat komunikasi.

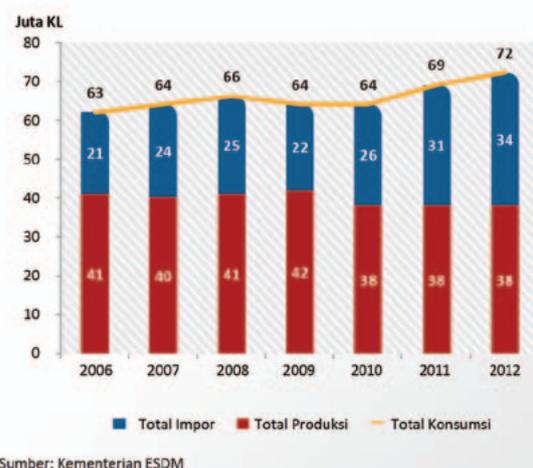
Ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran tidak hanya terjadi pada sektor industri barang berteknologi menengah dan tinggi, namun terjadi pula pada sektor energi dan sektor pangan. Pada sektor energi, sejalan dengan berlanjutnya ekspansi kelas menengah, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat di tengah produksi BBM yang semakin terbatas (Grafik 15.10). Sejak tahun 2004, konsumsi BBM telah melampaui produksi minyak domestik dan kapasitas pengilangan. Hal ini menyebabkan impor BBM terus meningkat sehingga defisit neraca perdagangan minyak semakin membesar. Pada tahun 2012, porsi impor BBM minyak telah mencapai 47,3% dari total kebutuhan.

Kebutuhan BBM yang terus meningkat juga mengganggu kualitas keuangan Pemerintah karena sebagian besar konsumsi BBM merupakan BBM bersubsidi yang mencapai 63,1% (2012). Dalam

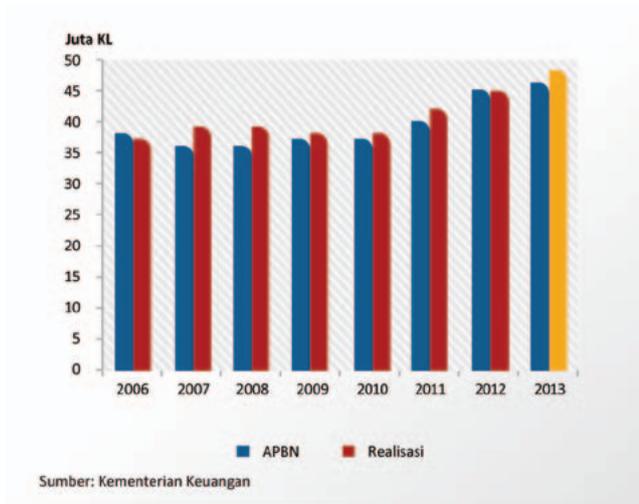


Grafik 15.9. Struktur Impor Berdasarkan Teknologi

lima tahun terakhir, konsumsi BBM bersubsidi selalu melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam APBN (Grafik 15.11), yang menyebabkan sempat dilakukan dua kali penyesuaian APBN-P pada tahun 2012. Semakin terbatasnya produksi minyak juga diperburuk dengan perkiraan produksi minyak bumi Indonesia yang diperkirakan habis pada tahun 2024 jika tidak ditemukan cadangan minyak baru. Biaya produksi minyak dari cadangan tersisa juga semakin tinggi seiring dengan tingkat kesulitan dan teknologi yang diperlukan. Sementara itu, cadangan minyak baru potensial yang berada di laut dalam dan *ultra deepwater* membutuhkan biaya eksplorasi



Grafik 15.10. Produksi dan Konsumsi BBM

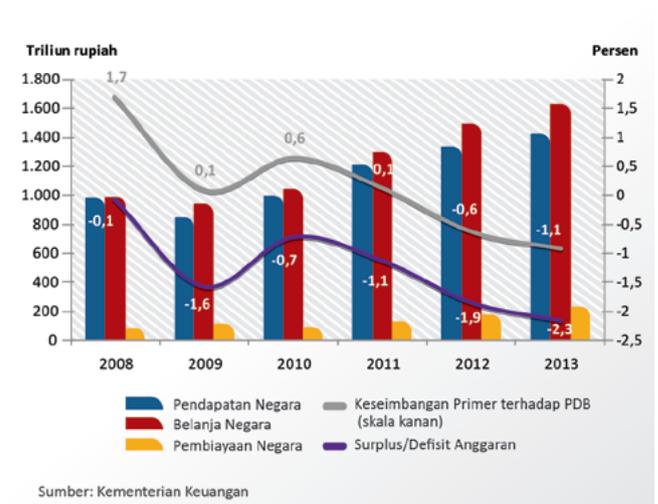


Grafik 15.11. Kuota dan Realisasi Volume BBM Bersubsidi

dan eksploitasi yang sangat besar dan jangka waktu eksplorasi hingga bisa berproduksi membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu antara 10-15 tahun.

Dinamika di sektor energi tersebut memberi tantangan yang tidak ringan di sisi fiskal dalam jangka menengah berupa risiko berlanjutnya defisit keseimbangan primer APBN yang sudah terjadi dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2013, keseimbangan primer tercatat defisit 1,1% dari PDB, meningkat dari 0,6% pada 2012 (Grafik 15.12). Risiko berlanjutnya defisit keseimbangan primer bersumber dari besarnya kebutuhan belanja dalam menopang subsidi energi, khususnya BBM. Sementara itu, pendapatan negara belum optimal karena potensi penurunan *lifting* migas dan belum optimalnya penerimaan pajak. Subsidi BBM yang terus membengkak pada gilirannya dapat mengurangi ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena porsi belanja modal (pembangunan) yang mempunyai dampak pengganda lebih besar ke perekonomian menjadi terbatas.

Sementara itu, pada sektor pangan, ketidakseimbangan yang terjadi bersumber dari sisi produksi, distribusi, dan permintaan. Produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas akibat berlanjutnya konversi lahan pertanian ke nonpertanian di tengah tingkat produktivitas dan tingkat penggunaan teknologi pertanian yang masih terbatas. Berdasarkan prognosa Badan Ketahanan Pangan, tahun 2012 ditandai dengan ketersediaan yang belum mencukupi kebutuhan, sehingga perlu dipenuhi melalui impor untuk beberapa komoditas pangan (Tabel 15.4). Hal ini berlanjut pada tahun 2013. Dari sisi distribusi, permasalahan muncul akibat



Grafik 15.12. Operasi Keuangan Pemerintah

infrastruktur konektivitas yang belum optimal. Dari sisi permintaan, di tengah keterbatasan sisi produksi, upaya pemenuhan kebutuhan yang semakin tinggi akhirnya dilakukan melalui impor, terutama pada komoditas hortikultura, daging sapi, dan kedelai. Ketergantungan impor yang cukup tinggi ini juga menimbulkan gejala harga-harga ketika keran impor ditutup, seperti yang terjadi pada periode laporan.

Secara keseluruhan, ketidakseimbangan struktural antara sisi permintaan agregat dan sisi penawaran sebagaimana disampaikan di atas, merupakan cerminan dari rendahnya kapabilitas sektor-sektor industri di dalam negeri. Hal ini dapat diilustrasikan lebih lanjut oleh hasil analisis *revealed comparative advantage* (RCA). Daya saing global ekspor Indonesia cenderung didominasi oleh produk-produk SDA bernilai tambah rendah, hasil-hasil industri padat karya berteknologi rendah, dan hanya beberapa kelompok produk yang dapat dikategorikan berteknologi menengah dan tinggi. Sementara itu, produk-produk hasil industri berteknologi menengah dan tinggi terlihat memiliki daya saing global yang rendah (Gambar 15.2).

Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kapabilitas dan kapasitas industri untuk industri-industri teknologi menengah dan tinggi, yang selanjutnya tercermin pada tingginya ketergantungan teknologi di berbagai kawasan di Nusantara (Gambar 15.3). Untuk mengatasi hal ini diperlukan peningkatan nilai tambah (hilirisasi) komoditas SDA, terutama di luar Jawa, dan peningkatan kapabilitas dan kapasitas untuk industri-industri manufaktur, baik barang antara maupun akhir, di Jawa sebagai kawasan dengan tingkat aglomerasi industri tertinggi di Indonesia.

Tabel 15.4. Prognosa Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Tahun 2012

Ton

Komponen	Stok Awal	Total Kebutuhan	Produksi			Neraca Domestik	Impor	Ekspor	Neraca Total
			Prod Kotor	Tercecer	Bersih				
Beras	1.249.201	33.580.902	40.104.966	1.335.495	38.769.471	5.188.568	1.182.045	865	7.618.950
Jagung		16.844.658	18.961.646	948.082	18.013.564	1.168.906	1.346.912	30.297	2.485.522
Kacang Tanah		814.424	709.063	35.453	673.610	- 140.814	177.735	1.368	35.553
Kedelai		2.127.256	783.158	39.158	744.000	- 1.383.256	1.522.955	976	138.722
Gula Pasir	603.181	2.613.271	2.591.689		2.985.538	372.267	60.998		1.036.446
Minyak Goreng	1.407.605	4.290.600	17.014.708	263.728	16.750.980	12.460.380		13.011.069	856.916
Bawang Merah		862.081	1.122.000	95.418	1.026.582	164.500			164.500
Cabe Besar		870.784	932.595	49.148	883.447	12.663			12.663
Cabe Rawit		660.595	707.484	37.284	670.200	9.605			9.605
Daging Sapi		519.844			414.870	- 104.974	95.020		- 9.954
Daging Unggas		1.094.408			1.467.517	373.109			373.109
Telur Unggas		1.738.616			2.098.655	360.039			360.039

Keterangan: a. Kebutuhan total adalah : Kebutuhan langsung + Kebutuhan antara
 b. Produksi kotor Tahun 2012 berdasarkan ARAM II
 c. Jumlah penduduk tahun 2012 : 248.729.000 jiwa (didasarkan BPS tahun 2012).
 Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan 2012

Tantangan Penguatan Modal Dasar Pembangunan

Secara keseluruhan, berbagai keterbatasan di sisi produksi tersebut tidak terlepas dari belum optimalnya ketersediaan modal-modal dasar bagi pembangunan kapabilitas dan kapasitas industri yang lebih tinggi. Modal-modal dasar tersebut adalah (a) infrastruktur konektivitas, baik fisik maupun digital yang memadai, berkualitas dan efisien, (b) modal sumber daya manusia (*human capital*) yang handal dan berdaya saing global, dan (c) iklim usaha dan institusi

yang kondusif, yang semuanya merupakan prasyarat pendukung bagi bertumbuhkembangnya industri-industri berbasis teknologi dengan kapasitas inovasi yang tinggi. Dalam banyak aspeknya, ketersediaan modal-modal dasar pembangunan tersebut belum sepenuhnya memadai, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara pesaing utama di kawasan.

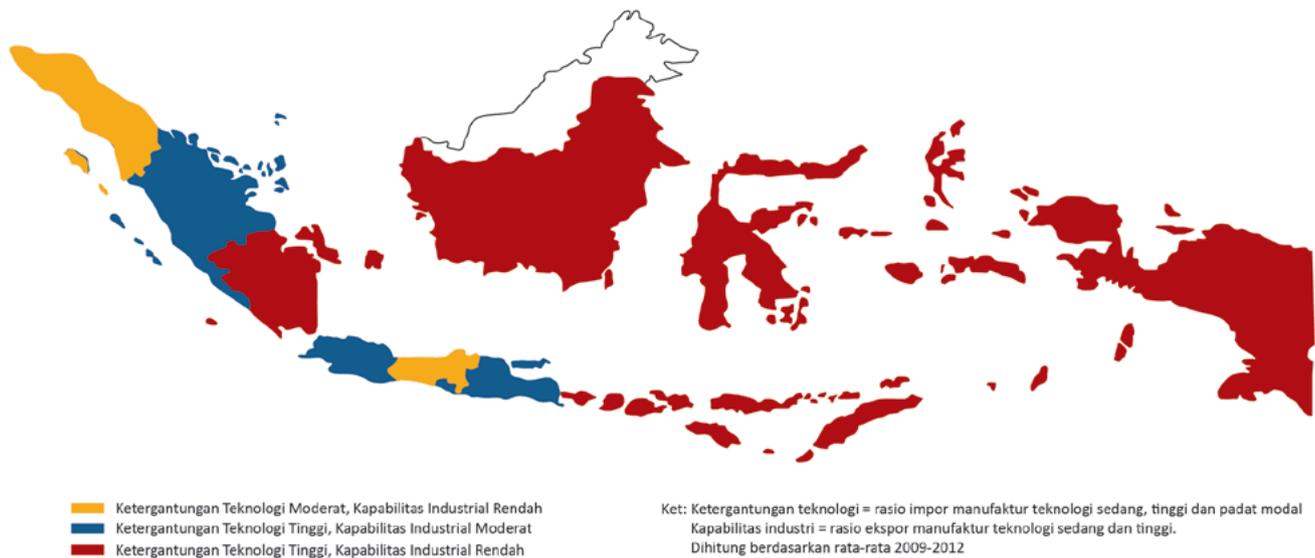
Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, kualitas infrastruktur konektivitas fisik dan digital di Indonesia masih relatif tertinggal (Tabel 15.5 dan Grafik 15.13). Ini artinya biaya logistik di Indonesia dalam jangka menengah akan cenderung lebih tinggi dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan, sehingga daya saing perekonomian Indonesia secara keseluruhan dapat semakin jauh tertinggal. Oleh karenanya, sebagai salah satu prioritas utama pembangunan, upaya penguatan infrastruktur konektivitas baik fisik maupun digital perlu dipercepat.

Sementara itu, dari sisi modal manusia, ketersediaan sumber daya manusia berpendidikan tinggi dan terampil serta pekerja riset yang handal di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan alam juga masih perlu mendapat perhatian (Grafik 15.14). Masih kurangnya ketersediaan modal manusia dengan tingkat keterampilan memadai menunjukkan masih rendahnya produktivitas pekerja dan kapasitas absorpsi teknologi dalam perekonomian. Hal ini dapat menurunkan minat produsen-produsen global barang-barang berteknologi menengah dan tinggi untuk merelokasi sebagian dari aktivitas produksinya ke Indonesia. Potensi ini tentunya menjadi kurang



Ket: Ilustrasi untuk beberapa produk, dihitung berdasarkan rata-rata 2009-2012
 Sumber: UNCTAD, diolah

Gambar 15.2. Daya Saing Produk-Produk Ekspor Indonesia Berdasarkan RCA



Gambar 15.3. Peta Ketergantungan Teknologi dan Kapabilitas Industrial di Nusantara

menguntungkan bagi perekonomian Indonesia dalam jangka menengah mengingat produsen-produsen global tersebut adalah juga para pemilik teknologi yang aktif melakukan R&D, yang kesemuanya diperlukan untuk peningkatan kapabilitas industri dan kapasitas inovasi dalam jangka menengah panjang.

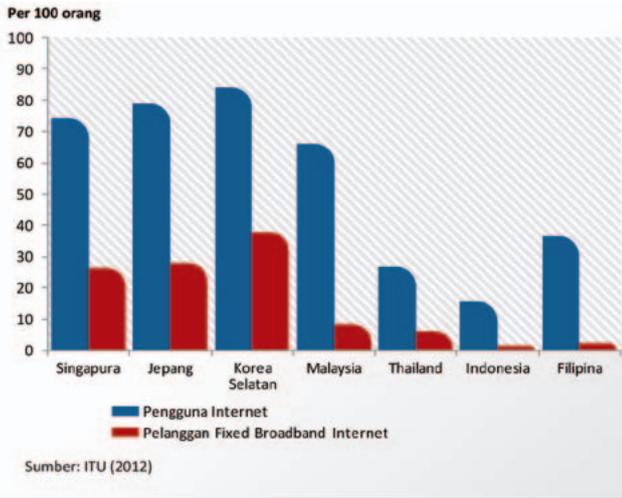
Masih belum memadainya jumlah pekerja riset di bidang sains dan teknologi di Indonesia juga terkait erat dengan masih rendahnya kegiatan R&D, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah (Grafik 15.15). Kuantitas

dan kualitas modal manusia yang kurang memadai pada gilirannya berpotensi memperlambat proses migrasi Indonesia dari negara tujuan ekspor menjadi negara pemasok dalam rantai produksi global barang-barang berteknologi menengah dan tinggi. Ini berarti pula bahwa proses peningkatan pendapatan perkapita dapat berjalan lambat. Terkait ini, fakta sederhana menunjukkan adanya hubungan positif antara ketersediaan modal manusia terampil yang memadai dengan kapasitas inovasi dan peningkatan pendapatan per kapita (Grafik 15.16 dan Grafik 15.17).

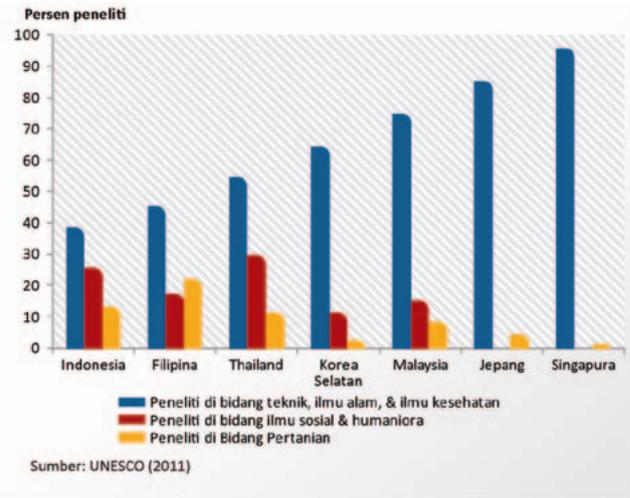
Tabel 15.5. Perbandingan Kualitas Infrastruktur

	Global Competitiveness Index (GCI)	Total Infrastruktur	Jalan	Rel Kereta Api	Pelabuhan	Udara	Listrik
China	4,8	4,3	4,5	4,7	4,5	4,5	5,1
Hong Kong	5,5	6,5	6,2	6,5	6,6	6,7	6,8
India	4,3	3,9	3,6	4,8	4,2	4,8	3,2
Indonesia	4,5	4,0	3,7	3,5	3,9	4,5	4,3
Korea	5,0	5,6	5,8	5,7	5,5	5,8	5,7
Malaysia	5,0	5,5	5,4	4,8	5,4	5,8	5,8
Filipina	4,3	3,7	3,6	2,1	3,4	3,5	4,0
Singapura	5,6	6,4	6,2	5,6	6,8	6,8	6,7
Sri Lanka	4,2	4,8	4,7	3,6	4,2	4,8	5,0
Thailand	4,5	4,5	4,9	2,6	4,5	5,5	5,2
Vietnam	4,2	3,4	3,1	3,0	3,7	4,0	4,0
Skala	1	2	3	4	5	6	7

Keterangan: Skala 1-7 (semakin tinggi semakin baik)
Sumber: World Economic Forum



Grafik 15.13. Perbandingan Konektivitas Digital Antar Negara

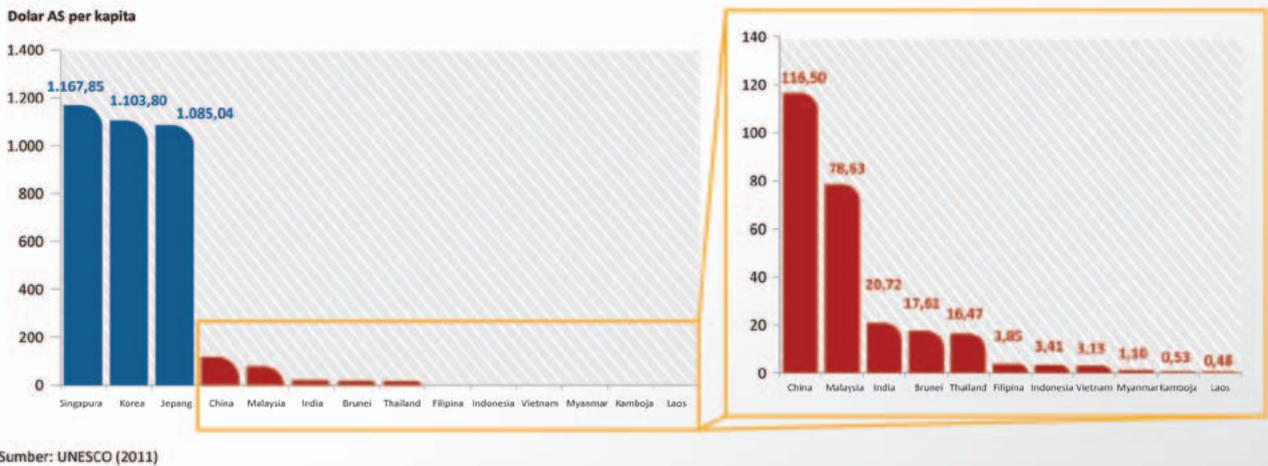


Grafik 15.14. Perbandingan Ketersediaan Peneliti Berdasarkan Bidang Keilmuan Antar Negara

Selanjutnya, dari sisi iklim usaha dan institusi terlihat pula bahwa kondisi saat ini di Indonesia masih menunjukkan belum optimalnya aspek-aspek ini dalam mendukung aktivitas usaha yang lebih luas oleh sektor swasta, baik PMA maupun PMDN. Berdasarkan indikator-indikator *Ease of Doing Business* dari *International Finance Corporation* (IFC), kemudahan berusaha Indonesia masih berada pada peringkat ke-120. Terkait ini, beberapa perbaikan yang masih diperlukan antara lain penegakan kontrak bisnis, penyelesaian sengketa bisnis, kemudahan memulai bisnis baru, dan perpajakan (Tabel 15.6).

Implikasi dari berbagai kelemahan pada modal-modal dasar pembangunan diatas adalah masih terbatasnya

investasi PMA oleh produsen global berbasis teknologi dan inovasi yang berkualitas yang mampu mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi, kapabilitas industri dan kapasitas inovasi domestik. Kondisi keterbatasan ini perlu segera dibenahi setidaknya karena dua hal. Pertama, kegiatan investasi PMA maupun kolaborasi PMA dan PMDN merupakan sumber-sumber pembiayaan yang lebih permanen bagi pembangunan ekonomi. Kedua, PMA oleh produsen global berbasis teknologi dan inovasi adalah PMA yang berkualitas. Kolaborasi antara PMDN (produsen lokal) dan PMA (produsen global) tersebut merupakan faktor penting dalam rangka meningkatkan keseluruhan kapabilitas industri dan kapasitas inovasi disektor manufaktur domestik yang masih lemah saat ini. Studi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi



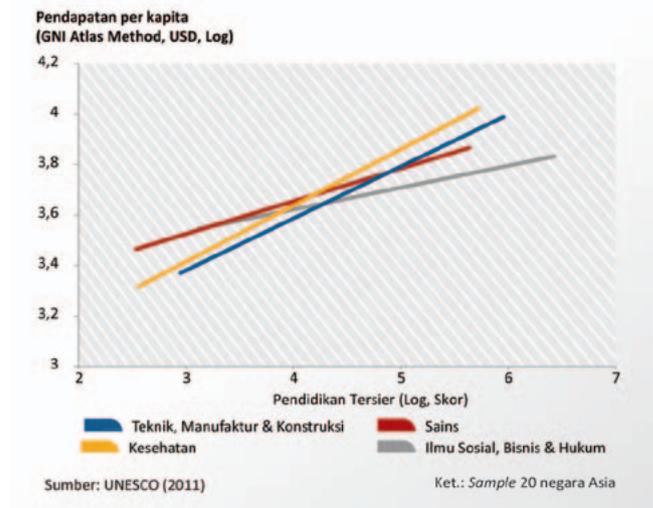
Grafik 15.15. Perbandingan Belanja Kotor Penelitian dan Pengembangan (R&D) Per Kapita Antar Negara



Grafik 15.16. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Kapasitas Inovasi Antar Negara

dan kapasitas inovasi di sektor industri domestik yang meningkat merupakan salah satu penopang kemampuan sektor industri untuk lebih berperan di pasar ekspor (Lihat Boks 15.1. Kapasitas Inovasi di Sektor Industri Pengolahan Indonesia).

Oleh karena itu, percepatan langkah-langkah reformasi struktural dalam rangka memperkuat modal-modal dasar pembangunan akan berdampak positif pada penguatan kapabilitas industri dan kapasitas inovasi di sektor industri domestik. Dalam konteks kesinambungan migrasi Indonesia menuju ke negara berpendapatan lebih tinggi, keterlambatan dalam merespons tantangan pembangunan modal dasar pembangunan dapat menyebabkan Indonesia berpotensi masuk



Grafik 15.17. Hubungan Antara Bidang Pendidikan Tersier dan Pendapatan Per Kapita

ke dalam jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).

15.3. Kebijakan Reformasi Struktural

Berbagai tantangan struktural sebagaimana disampaikan di atas dapat membatasi ruang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan reformasi struktural perlu dipercepat. Menurut pandangan Bank Indonesia, kebijakan reformasi struktural tersebut perlu difokuskan pada penguatan tiga pilar utama, yaitu sumber pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, daya saing

Tabel 15.6. Indikator Kemudahan Berusaha

	Peringkat Komposit	Kemudahan Memulai Bisnis Baru	Izin Aktivitas Konstruksi	Akses Listrik	Pendaftaran Properti Dagang	Kemudahan Mendapatkan Kredit	Perlindungan Investor	Intensitas Pembayaran Pajak	Kemudahan Perdagangan Antar Negara	Penegakan Hukum Kontrak Bisnis	Penyelesaian Sengketa Bisnis
Indonesia (2014)	120	175	88	121	101	86	52	137	54	147	144
Indonesia (2013)	116	171	77	121	97	82	51	132	52	146	142
Malaysia	6	16	43	21	35	1	4	36	5	30	42
Thailand	18	91	14	12	29	73	12	70	24	22	58
Filipina	108	170	99	33	121	86	128	131	42	114	100
Kamboja	137	184	161	134	118	42	80	65	114	162	163
India	134	179	182	111	92	28	34	158	132	186	121
China	96	158	185	119	48	73	98	120	74	19	78

Sumber: IFC



Gambar 15.4. Pilar Reformasi Struktural

sektor industri, dan kemandirian ekonomi domestik (Gambar 15.4). Penguatan pada ketiga pilar tersebut perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan ketahanan energi dan pangan serta penguatan modal-modal dasar pembangunan sebagai faktor-faktor pendukung pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan.

Dengan tetap memperkuat disiplin kebijakan fiskal dan moneter dalam mengelola perekonomian dalam jangka pendek, kebijakan reformasi struktural tersebut dapat dibagi menjadi tiga bidang. Pertama, penguatan bagi pembiayaan pembangunan melalui upaya pendalaman pasar keuangan. Kedua, peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi melalui upaya penguatan struktur produksi dan integrasi ke dalam rantai nilai global. Ketiga, optimalisasi ruang fiskal melalui upaya pengendalian subsidi energi.

Penguatan Basis Pembiayaan Pembangunan

Dalam rangka memperkuat pembiayaan pembangunan, diperlukan upaya-upaya pendalaman pasar keuangan. Pendalaman di pasar saham dan obligasi perlu difokuskan pada perluasan basis investor domestik. Selain di pasar saham dan obligasi, pendalaman

juga diperlukan di pasar uang dan valas yang belum dalam dan likuid. Upaya tersebut sangat diperlukan karena pasar uang yang dalam dan efisien merupakan prasyarat berjalannya transmisi pembentukan harga yang efisien dari instrumen-instrumen bertenor pendek ke instrumen-instrumen bertenor lebih panjang. Pada gilirannya, pasar yang dalam dan berkembang tersebut akan dapat berkontribusi sebagai alternatif sumber pembiayaan ekonomi domestik, utamanya pasar dengan instrumen bertenor panjang seperti pasar saham dan obligasi.

Upaya pendalaman pasar keuangan ini merupakan tanggung jawab bersama dari Bank Indonesia selaku otoritas moneter, OJK selaku otoritas pasar modal, Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal, pelaku pasar keuangan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Karena mencakup lintas otoritas, untuk mencapai hasil yang diharapkan, strategi pengembangan pasar keuangan perlu ditempuh secara terkoordinasi.

Sesuai dengan kewenangannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat langkah-langkah pendalaman pasar keuangan yang selama ini telah dilakukan untuk mendukung penguatan basis pembiayaan yang berkelanjutan. Strategi pengembangan pasar keuangan diarahkan pada upaya mewujudkan pasar keuangan yang likuid dan efisien, dengan tetap mengedepankan



Gambar 15.5. Upaya Pengembangan Pasar Repo

aspek ketahanan dan menjaga prinsip kehati-hatian. Guna memberikan manfaat optimal bagi perekonomian, pengembangan pasar keuangan dilakukan dengan berpegang pada sejumlah prinsip, yaitu memiliki keterkaitan dengan sektor riil, memberikan dampak minimal saat terjadi *shock/gangguan*, serta didasarkan pada peta permasalahan dan skala prioritas.

Pemetaan terhadap permasalahan di pasar keuangan mengindikasikan bahwa kurang berkembangnya pasar keuangan domestik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya dukungan dan pemahaman dari berbagai pihak terkait, regulasi yang kurang memberi ruang untuk pendalaman pasar, serta kelemahan pada sisi kelembagaan terkait belum adanya forum koordinasi lintas otoritas. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia melakukan upaya pendalaman pasar keuangan melalui pengembangan lima aspek, yaitu: (i) pengembangan pasar dan instrumen, (ii) regulasi dan standardisasi, (iii) penguatan infrastruktur sistem, (iv) penguatan peran kelembagaan, serta (v) peningkatan pemahaman dan edukasi kepada *stakeholders*.

Salah satu upaya Bank Indonesia untuk memperdalam pasar uang dan sekaligus membuka simpul segmentasi pasar adalah mendorong transaksi *repo* antarbank. Setidaknya terdapat tiga tujuan Bank Indonesia dalam mendorong penggunaan transaksi *repo* antarbank, yaitu mendukung terbentuknya *interbank money market line* yang lebih luas dan lebih tahan terhadap gejolak pasar, memitigasi permasalahan *default risk* dan *counterparty risk* serta mendorong pengelolaan likuiditas perbankan yang lebih efektif dan efisien.

Terkait dengan ini, pada Desember 2013 delapan bank telah berinisiatif menyusun dan menyepakati standar perjanjian *repo* yang dapat diacu oleh seluruh bank. Standar perjanjian Repo tersebut dikenal sebagai *Mini Master Repo Agreement* atau Mini MRA. Selanjutnya, Bank Indonesia akan meneruskan langkah inisiatif Mini MRA dalam implementasi yang lebih besar, yaitu *General Master Repo Agreement* (GMRA) Indonesia Annex (Gambar 15.5). Dengan meluasnya penggunaan Mini MRA, diharapkan *market line* repo antarbank akan terbentuk sehingga pada saatnya nanti implementasi GMRA akan lebih mudah diterapkan, bahkan dengan institusi keuangan nonbank.

Dalam rangka percepatan upaya pendalaman pasar keuangan yang telah secara bertahap dilakukan, Bank Indonesia membentuk *Task Force* Pendalaman Pasar Keuangan. *Task force* ini memfokuskan tahapan-tahapan yang telah direncanakan tersebut kepada pelaksanaan yang lebih cepat dan koordinatif dengan berbagai otoritas terkait.

Sementara itu, dari sisi pengelolaan likuiditas rupiah, operasi moneter akan melanjutkan strategi menyerap eksekusi likuiditas struktural secara terarah dan terukur, antara lain dengan perpanjangan tenor penyerapan operasi pasar terbuka. Ke depan, strategi ini akan didukung dengan penerbitan SBI tenor 1 tahun atau lebih, dan *Medium Term Notes*. Selain itu, BI juga akan menempuh beberapa pengaturan terhadap pasar uang dan berbagai instrumen *funding* pengelolaan likuiditas lembaga keuangan, seperti penyempurnaan ketentuan surat berharga komersial (*commercial paper*) dan transaksi repo antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi

Terkait dengan kebijakan untuk memperkuat daya saing sektor industri dan kemandirian ekonomi, Bank Indonesia memandang keseluruhan kebijakan reformasi struktural perlu diletakkan dalam konteks menjawab lingkungan strategis persaingan global yang semakin kompleks. Hal ini terutama sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah (*middle income country*), ditandai dengan persaingan dari sisi upah dan non-upah yang semakin kuat. Dalam hal ini, intensitas persaingan antarnegara berkembang berpendapatan menengah (*emerging middle income countries*) dalam satu dekade terakhir telah semakin mengerucut pada persaingan kualitas dan kecepatan implementasi kebijakan publik dalam rangka membangun perekonomian yang efisien dan berbasis inovasi.¹ Secara lebih spesifik, di awal abad ke-21 ini negara-negara berpendapatan menengah saling berlomba untuk dapat menjadi bagian penting kolaborasi produksi dalam rantai nilai global, khususnya untuk barang-barang hasil industri berteknologi menengah dan tinggi, baik barang jadi maupun barang-barang antara dan komponen.²

Bagi negara-negara berpendapatan menengah yang teraspirasi untuk dapat bermigrasi ke negara maju dengan cepat, integrasi ke dalam rantai nilai global tersebut menjadi sebuah kebutuhan.³ Integrasi ke rantai nilai global menggambarkan partisipasi aktif suatu negara dalam perdagangan berbasis nilai tambah (*trade in value added, TiVA*).⁴ Dalam aktivitas perdagangan berbasis nilai tambah tersebut suatu negara menjadikan dirinya bagian dari lokasi produksi barang antara dan atau perakitan barang akhir untuk kemudian diekspor kembali ke seluruh dunia, dan atau dikonsumsi pasar domestik. Produsen global yang menempatkan fasilitas produksinya (melakukan *off-shoring*) ke negara tersebut dan pemasok lokal yang mendukungnya, akan menjadi tulang punggung sektor industri di negara tersebut.⁵

- 1 World Economic Forum. (2013). *"The Global Competitiveness Report 2012-2013"*. Insight Report. World Economic Forum. Geneva.
- 2 UNCTAD. (2013). *"Global Value Chains and Development: Investment and Value Added Trade in the Global Economy"*. A Preliminary Analysis / Advanced Unedited Versions. United Nations Conference on Trade and Development. Geneva.
- 3 Hausmann, R., Hwang, J., and Rodrik, D. (2005). *"What You Export Matters"*. NBER Working Paper 11905. National Bureau of Economic Research. Cambridge.
- 4 OECD & WTO OMC. (2013). *"Trade In Value Added: Concepts, Methodologies, And Challenges (Joint OECD-WTO NOTE)"*; WTO & IDE-JETRO. *"Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia: From Trade in Goods to Trade in Tasks"*. Made in The World Initiatives. WTO. Geneva.
- 5 UNIDO. (2013). *"The Industrial Competitiveness of Nations: Looking*

Oleh karena itu, meningkatnya keterlibatan dalam TiVA akan diiringi dengan meningkatnya PMA untuk industri-industri berteknologi menengah dan tinggi, dan terbangunnya produsen-produsen lokal yang handal dan mampu menyerap serta memanfaatkan teknologi.⁶ Dalam konteks ini pula, negara-negara yang terlibat dalam TiVA akan secara bertahap mengalami proses peningkatan kapabilitas industrial (*industrial upgrading*) dan mendapat eksternalitas positif, berupa penyerapan tenaga kerja yang lebih berkualitas, kapabilitas pemasok lokal (*local suppliers*) yang meningkat, dan berkembangnya sektor-sektor jasa pendukung.⁷ Berbagai dampak positif ini menyebabkan negara-negara berpendapatan menengah berpacu membangun faktor-faktor pendukung (*enabling factors*) agar jurisdiksi perekonomiannya menjadi menarik bagi industri-industri global berteknologi menengah dan tinggi untuk menempatkan sebagian dari fasilitas produksinya.⁸ Ini berarti pula bahwa melalui ketersediaan *enabling factors* tersebut, sebuah negara berpendapatan menengah memiliki peluang yang lebih baik untuk bermigrasi ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan selanjutnya masuk ke kelompok negara maju.⁹

Back, Forging Ahead". Competitiveness Industrial Performance Report 2012/2013. United Nations Industrial Development Organization. Vienna; UNIDO. (2004). *"Inserting Local Industries Into Global Value Chains And Global Production Networks: Opportunities and Challenges for Upgrading With a Focus on Asia"*. UNIDO Working Papers. Vienna.

- 6 Winkler, D. (2013). *"Potential and Actual FDI Spillovers in Global Value Chains: The Role of Foreign Investor Characteristics, Absorptive Capacity and Transmission Channels"*. International Trade Department. Poverty Reduction and Economic Management Network. The World Bank. Washington D.C. Policy Research Working Paper 6424.
- 7 Cattaneo, O., Gerefi, G. Miroudot, S., and Taglioni, D. (2013). *"Joining, Upgrading, and Being Competitive in Global Value Chains: A Strategic Framework"*. International Trade Department. Poverty Reduction and Economic Management Network. The World Bank. Washington D.C. Policy Research Working Paper 6406.
- 8 Arvis, J. F., Mustra, M.A., Ojala, L., Shepherd, B. and Saslavsky, D. *"Connecting to Compete 2012: Trade Logistics Performance Index and Its Indicators"*. International Trade Department. The World Bank: Washington D.C. ; Farole, T. and Winkler, D. (2013). *"Making Foreign Direct-Investment Work for Sub-Saharan Africa: Local Spillovers and Competitiveness in Global Value Chains"*. International Trade Department. The World Bank. Washington D.C.
- 9 Akan tetapi perlu pula dicatat bahwa keterlibatan dalam TiVA juga memiliki eksternalitas negatif. Salah satunya adalah meningkatnya risiko terkena rambatan dari siklus *boom-bust* perdagangan global. Negara yang tidak terlalu terlibat dalam TiVA cenderung terinsulasi dari siklus perdagangan global tersebut namun kehilangan daya saing industri. Sementara itu negara yang banyak terlibat dalam TiVA cenderung ter-ekspos pada siklus perdagangan global, namun memiliki kapabilitas dan daya saing industri yang lebih baik. Lihat Gangnes, B., Ma, A.C., and Van Assche, A. (2012). *"Global Value Chains and the Transmission of Business Cycle Shocks"*. Asian Development Bank. Manila. Working Paper Series No.329; Altomonte, C., Di Mauro, F., Ottaviano, G., Rungi, A., and Vicard, V. (2012). *"Global*

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, upaya penguatan pilar daya saing dan kemandirian ekonomi dapat didudukkan sebagai upaya transformasi perekonomian Indonesia untuk mengejar ketertinggalan kapabilitas industri dari negara-negara pesaing di kawasan, yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan nilai tambah perdagangan dan terintegrasi ke dalam rantai nilai global. Untuk itu, kebijakan-kebijakan reformasi struktural dalam kedua pilar tersebut perlu diarahkan pada upaya untuk memastikan bahwa produsen-produsen pada sisi penawaran yang beroperasi di Indonesia, baik PMA, PMDN, maupun *joint ventures*, adalah produsen-produsen yang memproduksi barang-barang hasil industri yang padat nilai tambah, padat modal manusia, padat aktivitas penelitian dan pengembangan (R&D), dan padat penyerapan teknologi.

Dengan arah kebijakan tersebut, beberapa faktor pendukung (*enabling factors*) berikut perlu mendapat prioritas dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan. Faktor-faktor ini terkait erat dengan dan merupakan perluasan dari modal-Modal dasar pembangunan sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, yaitu ketersediaan: (i) Konektivitas domestik, baik fisik maupun digital, yang handal dan bebas hambatan; (ii) Sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi yang berdaya saing global; (iii) Universitas, institut teknologi dan lembaga-lembaga riset sains dan teknologi yang berstandar internasional; (iv) Infrastruktur sains dan teknologi; (v) Iklim usaha yang ramah dan institusi publik yang melayani sebagai sebuah layanan publik yang terbuka bagi semua; dan; (vi) Kerangka kerja dan institusi yang efektif dalam menghasilkan kerjasama yang produktif antara industri, lembaga-lembaga riset dan pendidikan, dengan lembaga Pemerintah dalam aktivitas inovasi, pengkajian dan penerapan teknologi.

Selanjutnya, sebagai sebuah pandangan awal, transformasi ekonomi dapat diarahkan untuk membangun Nusantara sebagai sebuah ekosistem inovasi berbasis industri yang terintegrasi ke dalam rantai pasokan global barang-barang akhir dan antara bernilai tambah tinggi beserta komponennya. Integrasi tersebut akan membuka kemungkinan bagi Indonesia di masa depan untuk memiliki kapabilitas industri yang lebih tangguh dengan postur transaksi berjalan yang lebih kokoh. Pengalaman

negara-negara lain menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu lama pada modal dasar SDA dan industri berteknologi rendah padat karya dapat memperlambat proses transisi ke negara maju. Sebaliknya, tersedianya industri-industri handal produsen global barang-barang bernilai tambah tinggi akan memperbaiki kecepatan dan kualitas penciptaan pendapatan dalam perekonomian. Dalam kaitan ini, integrasi industri domestik yang semakin dalam ke rantai nilai global di samping dapat memperkuat postur neraca pembayaran, juga mendorong aktivitas ekonomi yang lebih beragam, lebih sarat penyerapan modal manusia terampil, dan lebih inklusif.

Agenda transformasi ekonomi tersebut menjadi sangat mendesak dewasa ini dalam rangka mempersiapkan Indonesia sebagai pelaku yang diperhitungkan di ASEAN. Mendesaknya tuntutan mempercepat implementasi kebijakan reformasi struktural tersebut berimplikasi pula pada perlunya untuk mengkaji ulang model pertumbuhan (*growth model*) yang selama ini diterapkan. Model pertumbuhan tidak dapat lagi disandarkan pada upah buruh yang murah dan aktivitas ekstraktif SDA semata. Sebagai negara berpenghasilan menengah, sudah saatnya Indonesia menyegerakan langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan kapabilitas industri, kualitas barang, kapasitas inovasi, keahlian tenaga kerja serta menyeimbangkan antara permintaan domestik dengan ekspor. Dalam konteks itu, keseluruhan upaya membangun ekosistem inovasi berbasis industri di seluruh Nusantara dapat dilihat sebagai sebuah model pertumbuhan baru (*"A New Growth Model"*). Dalam ekosistem tersebut, proses difusi teknologi industri, aktivitas penelitian/pengembangan (R&D) dan inovasi, serta kegiatan pendidikan, saling berinteraksi secara intensif, dan ditopang oleh konektivitas fisik dan digital yang handal, serta dukungan iklim usaha serta institusi yang kondusif. Dengan ini, diharapkan daya saing dan kemandirian ekonomi di seluruh wilayah Nusantara dapat semakin kuat.

Dalam membangun ekosistem inovasi berbasis industri di seluruh Nusantara tersebut Pemerintah dapat mengoptimalkan berbagai jendela kesempatan yang tersedia dalam tatanan industri global berupa kebutuhan aktivitas *offshoring* oleh produsen-produsen global. Masalah defisit teknologi di Nusantara menuntut adanya strategi alih teknologi yang sesuai dengan realitas industri global saat ini. Dalam kaitan ini, strategi investasi perlu diarahkan untuk mendorong relokasi (*off-shoring*) sebagai fasilitas produksi produsen-produsen global ke Indonesia. Langkah ini, selain akan memperkuat struktur produksi di sektor riil, juga memberi manfaat yang besar bagi pembiayaan ekonomi jangka menengah panjang

Value Chains During The Great Trade Collapse: A Bullwhip Effect?'. European Central Bank. Frankfurt. ECB Working Paper Series No 1412; IMF. (2013). *"Trade Interconnectedness: The World with Global Value Chains"*, International Monetary Fund. Washington D.C.

dan pendalaman pasar di sektor keuangan. Namun untuk itu, defisit infrastruktur, modal manusia, iklim usaha dan institusi perlu segera ditangani. Kebijakan pendidikan nasional seyogyanya dapat diarahkan pada peningkatan jumlah dan kualitas pekerja di bidang sains dan teknik yang handal. Hal ini untuk meningkatkan ketersediaan modal manusia yang sesuai dengan tuntutan industri berteknologi menengah-tinggi yang membutuhkan kemampuan teknis dan analitis yang handal dan menuntut kreativitas. Sementara itu, masalah defisit infrastruktur, iklim usaha dan institusi menuntut implementasi kebijakan pembangunan untuk penyediaan infrastruktur konektivitas digital maupun fisik yang efisien dan handal, infrastruktur sains dan teknologi yang mendukung peningkatan kapabilitas industri, serta perbaikan iklim investasi (*ease of doing business*) agar *at par* atau bahkan lebih baik dari negara-negara pesaing di Asia. Tidak kalah penting adalah tersedianya kerangka institusional di bidang perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan yang memperkuat koordinasi dan kecepatan implementasi program-program pembangunan.

Dalam upaya menjadikan seluruh wilayah di Indonesia sebagai sebuah ekosistem inovasi berbasis industri yang terintegrasi secara mantap dalam rantai nilai global, peningkatan kapabilitas industri dan kapasitas inovasi di sisi penawaran (*industrial upgrading*) juga dapat ditinjau dari dimensi spasial dengan mempertimbangkan variasi jenis dan ketersediaan sumber daya (*factor endowments*) pada masing-masing kawasan di Indonesia. Pengembangan industri-industri berteknologi menengah-tinggi dapat dilakukan di kawasan Jawa, sedangkan kawasan luar Jawa dapat dikembangkan untuk industri-industri bahan baku dan antara berdasarkan kekayaan SDA yang dimilikinya. Dengan desain rancang-bangun *industrial upgrading* tersebut hilirisasi yang meningkatkan nilai tambah industri berbasis SDA perlu diupayakan untuk terjadi di kawasan luar Jawa, sementara pengembangan industri berteknologi menengah dan tinggi difokuskan di kawasan Jawa (Diagram 15.1). Dengan strategi tersebut, diharapkan dapat terjadi integrasi *supply-demand* bahan baku, barang antara, dan produk jadi antarkawasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

Pembangunan Nusantara sebagai sebuah ekosistem inovasi berbasis industri yang terhubung secara mantap ke dalam rantai nilai global dapat mengambil bentuk pembangunan kawasan-kawasan industri (*industrial zones*) yang terintegrasi dengan pusat-pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi (Puspipstek) serta lembaga-lembaga pendidikan vokasi, politeknik dan

universitas, atau *techno & science parks*.¹⁰ Pandangan tentang pembentukan Kawasan Industri, Teknologi dan Sains (*industrial techno & science parks*) yang terintegrasi ini didasarkan pada kebutuhan *enabling factors* terkait *industrial upgrading* dan prasyarat integrasi struktur produksi domestik ke dalam rantai nilai global sebagaimana yang diilustrasikan pada Diagram 15.2 untuk industri-industri berteknologi menengah dan tinggi di kawasan Jawa dan Diagram 15.3 untuk industri bahan baku dan antara berbasis SDA di kawasan Luar Jawa.

Sebagaimana yang dapat dicermati pada Diagram 15.2, salah satu penyebab dari ketidakseimbangan struktural di sisi penawaran sebagaimana yang telah diulas sebelumnya adalah defisit kapabilitas dan kapasitas pada industri-industri domestik berteknologi menengah dan tinggi. Defisit tersebut menyebabkan adanya kesenjangan pasokan (*supply gap*) barang-barang berteknologi menengah dan tinggi yang kemudian diserap oleh impor. Untuk mengatasi defisit kapabilitas dan kapasitas industri tersebut, Indonesia memerlukan alih teknologi yang dimiliki oleh para produsen pemegang merek global barang-barang berteknologi menengah dan tinggi (*technology leverage*) yang tersimpan di sepanjang rantai nilai global.

Untuk dapat menarik minat produsen-produsen global tersebut agar melakukan *offshoring* berbagai aktivitasnya di Indonesia, perlu diperhatikan motivasi mereka dalam menanamkan modal di suatu negara yang biasanya berkisar pada: (a) motif untuk mencapai efisiensi biaya, (b) motif inovasi untuk memenuhi preferensi pasar lokal dan regional, (c) motif untuk memasok ke pasar global yang lebih luas, dan (d) motif untuk melakukan ekstraksi SDA.¹¹ Empat motivasi ini menimbulkan tuntutan prasyarat ketersediaan *enabling factors* dan karakteristik terkait *enabling factors* yang berbeda sebagaimana dirangkum pada Diagram 15.2 dan Diagram 15.3. Berdasarkan prasyarat *enabling factors* dan karakteristiknya tersebut maka terdapat sejumlah

10 Pandangan-pandangan ini mendukung gagasan tentang implementasi Sistem Inovasi Nasional/Daerah (SINAS/SIDA) di Indonesia. Terkait SINAS/SIDA, lihat Taufik, Tatang A. (2013). "Penguatan Sistem Inovasi: Bahan Ringkas tentang Program BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi".

11 Namun perlu diperhatikan adanya tarik menarik antara motivasi (b) dan (c) mengingat dalam motivasi (c) suatu produk harus terstandarisasi untuk memenuhi preferensi global. Tensi tersebut dapat berkurang bila ukuran permintaan lokal ataupun regional cukup besar secara pangsa terhadap total ukuran permintaan global. Dalam kaitan ini implementasi komunitas ekonomi ASEAN (KEA) akan memperbesar ukuran pasar regional ASEAN sehingga berpotensi menurunkan tarik menarik terkait (b) dan (c), sehingga kemampuan untuk menjadi lokasi penting dalam global *offshoring* akan membawa keuntungan bagi Indonesia.

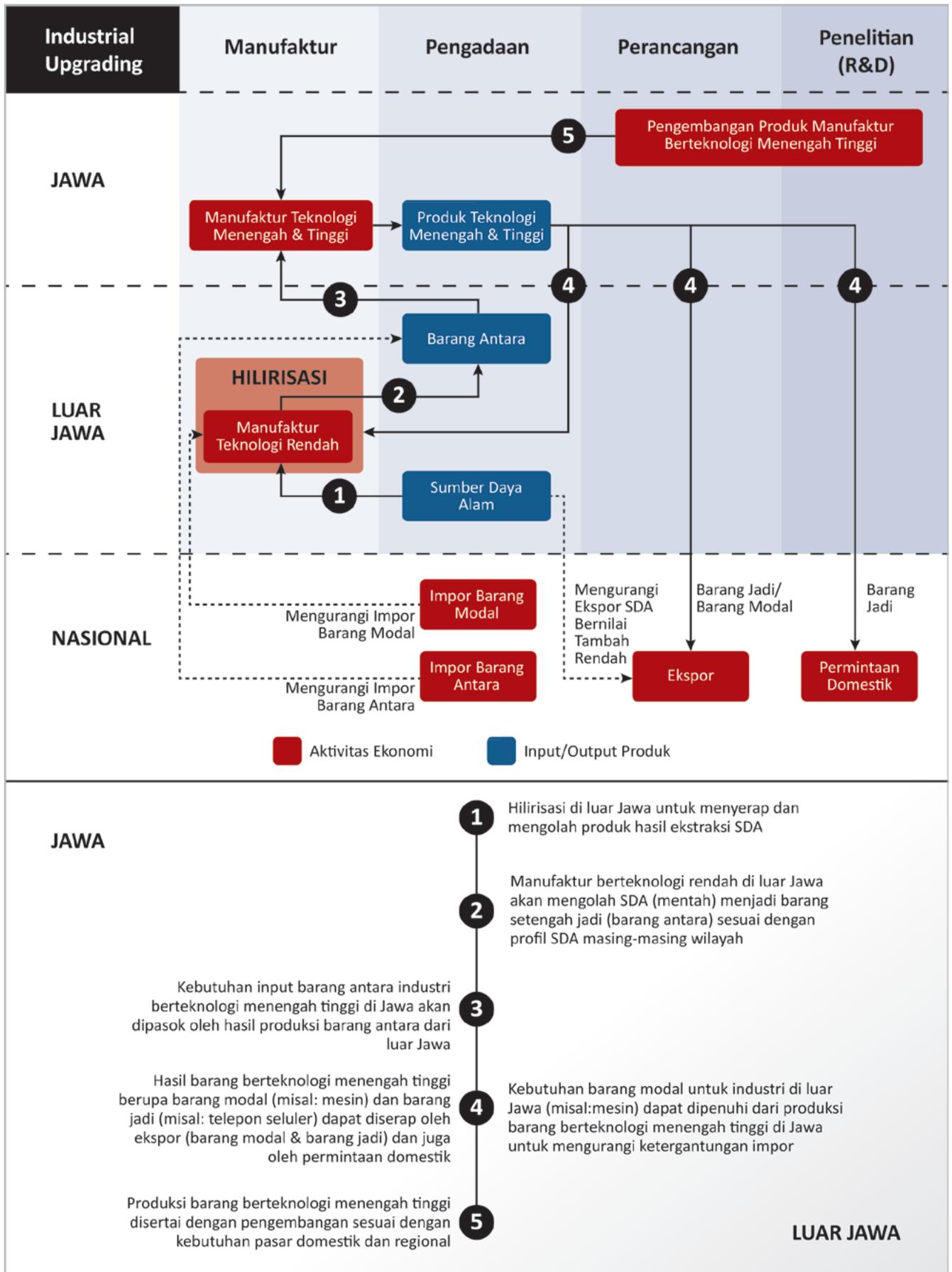


Diagram 15.1. Pandangan Tentang Arah Pembangunan Kapabilitas Industri (*Industrial Upgrading*) Berdasarkan Kawasan

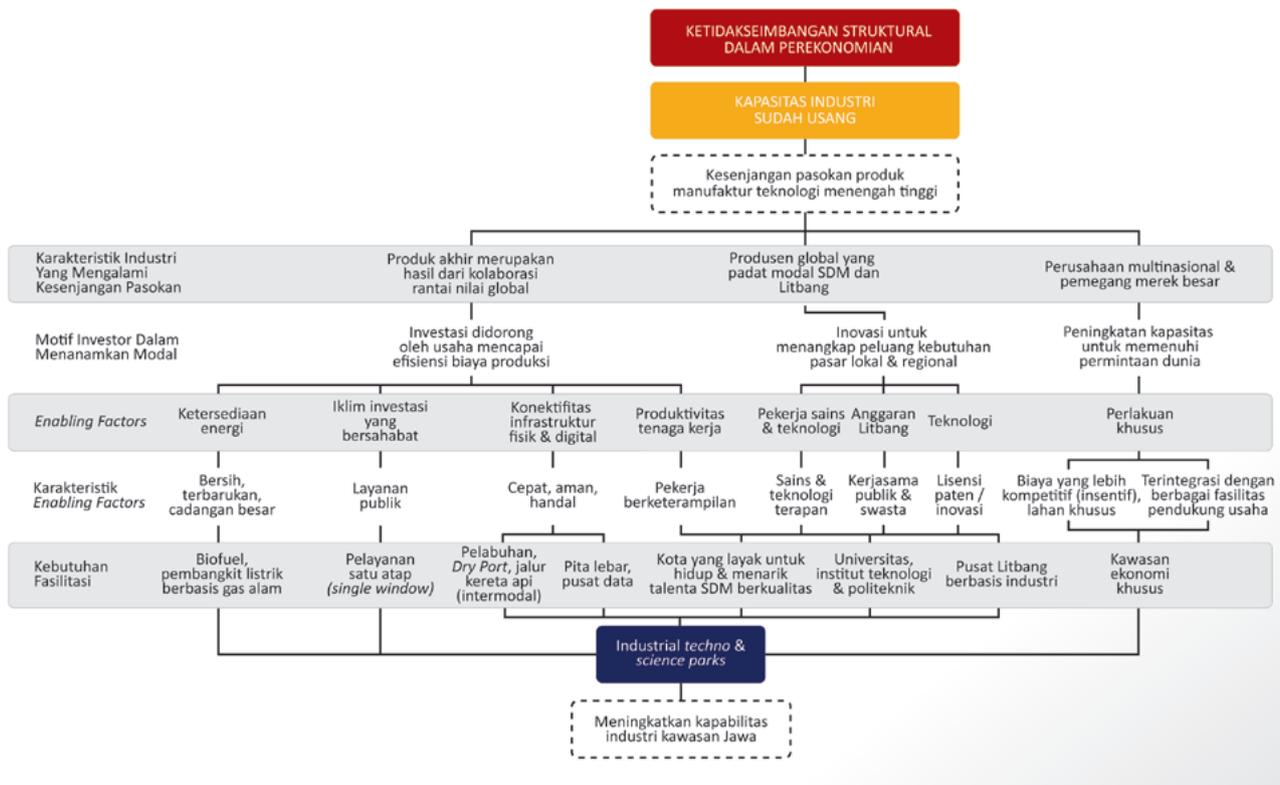


Diagram 15.2. **Konsideran Industrial Upgrading Di Kawasan Jawa**

aspek fasilitasi yang perlu menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan-kebijakan struktural yang relevan.

Terkait dengan keperluan untuk menumbuh-kembangkan industri-industri berteknologi menengah dan tinggi di Jawa, baik itu berupa PMA, PMDN, maupun kolaborasi PMA dan PMDN, seperti yang dirangkum pada Diagram 15.2, berikut ini adalah bentuk fasilitasi terkait *industrial techno & science parks* untuk kawasan Jawa: (i) Ketersediaan pasokan sumber energi listrik yang memadai, bersih, murah dan terbarukan, antara lain melalui penyediaan energi berbasis *bio-fuel* dan gas alam untuk keperluan industri; (ii) Konektivitas fisik bebas hambatan dari dan menuju fasilitas produksi yang memiliki dukungan terhadap transportasi intermodal; (iii) Konektivitas digital yang cepat dan handal berupa jaringan pita lebar dan pusat data; (iv) Universitas, institut teknologi, politeknik dan sekolah-sekolah menengah kejuruan teknik; (v) Pusat penelitian dan pengembangan (R&D) berbasis industri; (vi) Kawasan ekonomi khusus yang menyediakan layanan fiskal, administrasi dan birokrasi satu atap bagi investor, serta menyediakan berbagai fasilitas pendukung usaha (antara lain namun tidak terbatas pada pergudangan, keamanan, dan pengolahan/pemrosesan pembuangan limbah industri); (vii) Kota-kota satelit yang layak untuk hidup dan sarat

aktivitas sosial budaya, dengan institusi-institusi pelayanan publik yang paripurna, dalam rangka menarik talenta-talenta (SDM) yang berkualitas.

Sementara itu, untuk pembangunan *industrial techno & science parks* berbasis SDA di Kawasan Luar Jawa, konsideran-konsideran yang dapat diperhatikan adalah sebagai berikut. Persoalan ketidakseimbangan struktural antara sisi penawaran dan permintaan dalam perekonomian sebagaimana diulas sebelumnya juga merupakan dampak dari tidak terhubungannya industri ekstraktif padat SDA di luar Jawa dengan aktivitas industri di Jawa. Penyebabnya adalah tidak cukup kuatnya hilirisasi aktivitas ekstraktif padat SDA di luar Jawa, terutama dalam memasok bahan baku dan antara untuk keperluan industri di Jawa. Karakteristik dari industri-industri padat SDA adalah lokasi aktivitasnya yang dekat dengan lokasi input dan bersifat padat modal. Motivasi dari para investor SDA untuk menanamkan modal di suatu tempat secara umum adalah untuk mendekati ke lokasi input produksi, memasok permintaan dunia, dan memroses SDA menjadi bahan baku dan antara. Terkait motivasi-motivasi ini maka beberapa *enabling factors* dan karakteristik terkaitnya yang dapat diidentifikasi untuk memicu bertumbuhkembangnya hilirisasi aktivitas ekstraktif padat SDA adalah sebagaimana yang dirangkum

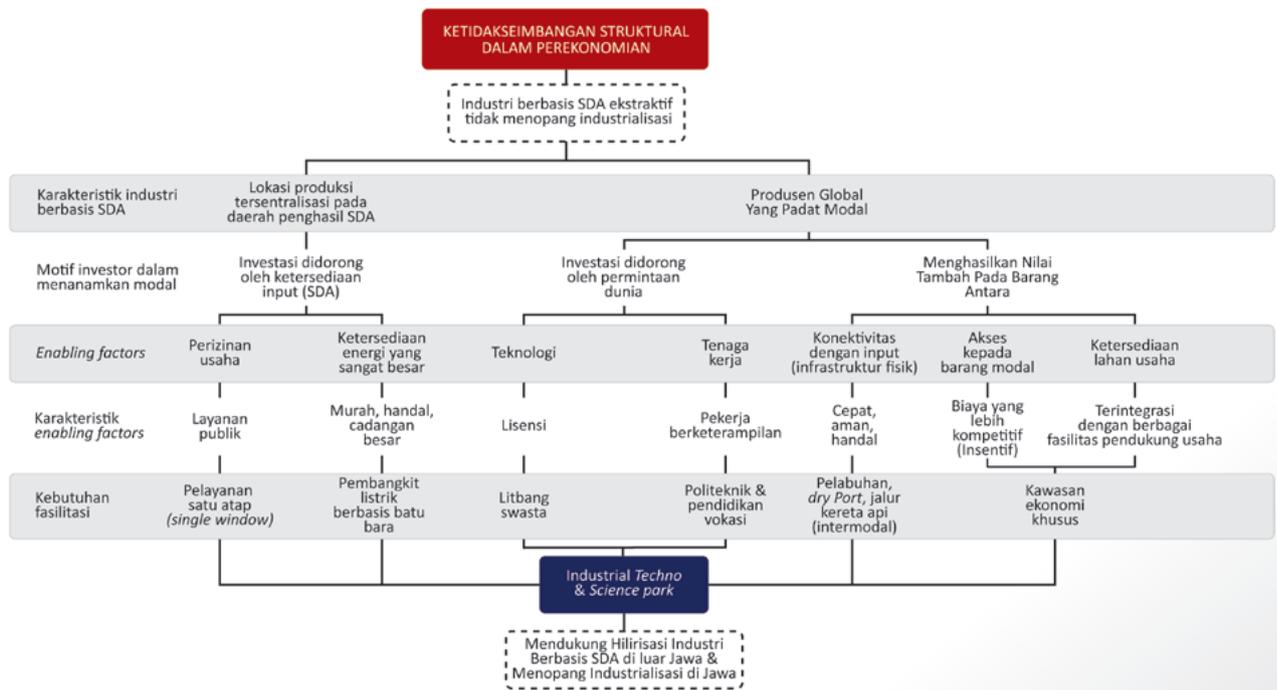


Diagram 15.3. *Konsideran Industrial Upgrading Di Kawasan Luar Jawa*

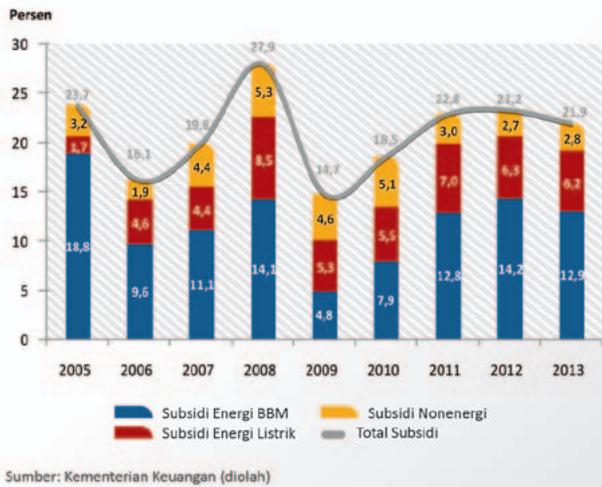
di Diagram 15.3. Beberapa fasilitasi yang diperlukan terkait pembangunan *industrial techno & science parks* untuk hilirisasi aktivitas SDA di luar Jawa adalah : (i) Layanan fiskal, administrasi dan birokrasi satu atap bagi investor; (ii) Pembangkit listrik berbasis batu bara; (iii) Fasilitasi aktivitas R&D; (iv) Ketersediaan politeknik dan pendidikan vokasi; (v) Konektivitas fisik berupa pelabuhan, *dry-port* dan jalur kereta api dari dan menuju fasilitas produksi; (vi) Kawasan ekonomi khusus dengan fasilitas pendukung usaha.

Akhirnya, dengan semakin bertumbuhkembangnya aglomerasi industri berteknologi menengah-tinggi di kawasan Jawa, diharapkan hasil produksi industri bahan baku dan barang antara berbasis SDA di kawasan luar Jawa dapat diserap secara optimal di kawasan Jawa, sehingga ada kepastian permintaan dan harga jual. Tidak hanya semata aliran barang, namun transfer teknologi melalui aktivitas R&D dari kawasan Jawa diharapkan juga dapat mendukung peningkatan produktivitas industri di kawasan luar Jawa. Tujuan akhirnya adalah hilirisasi industri berbasis SDA di kawasan luar Jawa dapat meningkatkan nilai tambah produk SDA, mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan barang antara, dan memperkuat keseluruhan daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Optimalisasi Ruang Fiskal

Akhirnya, dari sisi fiskal, isu yang mengemuka adalah bagaimana mengendalikan subsidi energi yang porsinya dalam APBN cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013, subsidi energi mengambil pangsa hampir 20% dari belanja negara, yaitu sekitar 13% berupa subsidi BBM dan sekitar 6% berupa subsidi listrik (Grafik 15.18). Porsi subsidi energi yang besar tersebut perlu dicermati karena menimbulkan beberapa risiko yang dapat mengganggu upaya memperkuat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Risiko dari besarnya subsidi BBM tersebut berkaitan dengan berkurangnya ruang fiskal dalam mendorong produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan. Besarnya porsi subsidi BBM akan mengurangi porsi belanja modal dalam APBN yang notabene memiliki dampak lebih luas dan permanen pada fondasi pertumbuhan ekonomi. Berbagai studi menunjukkan pentingnya peran belanja modal, termasuk pengeluaran infrastruktur, dalam menopang perekonomian secara keseluruhan. Studi Mochtar (2005) untuk kasus Indonesia menunjukkan pengeluaran infrastruktur pemerintah memiliki kontribusi positif pada



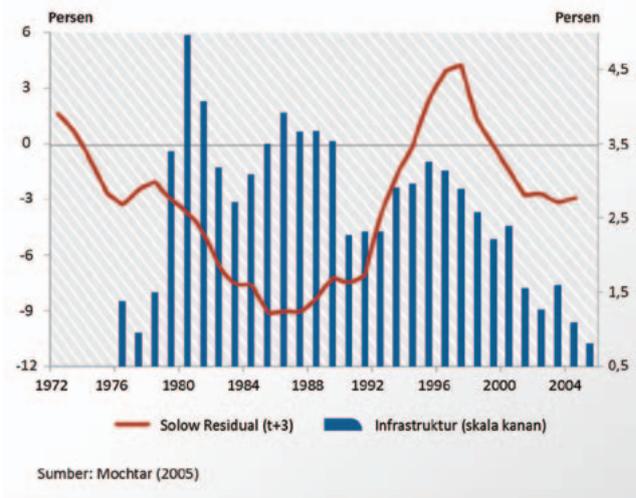
Grafik 15.18. Pangsa Belanja Subsidi terhadap Belanja Pemerintah

peningkatan pertumbuhan ekonomi.¹² Korelasi antara pengeluaran infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tersebut bahkan tetap positif untuk pertumbuhan ekonomi dalam periode tiga tahun ke depan.

Studi juga menunjukkan hubungan negatif antara pengeluaran infrastruktur pemerintah dan inflasi dan hubungan negatif tersebut dapat terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan setelah pengeluaran infrastruktur pemerintah tersebut dilakukan. Hubungan negatif dapat terjadi sepanjang infrastruktur pemerintah tersebut mampu menghasilkan produktivitas yang sama atau lebih tinggi dibandingkan investasi yang dilakukan swasta. Dalam kondisi ini, peningkatan infrastruktur pemerintah akan meningkatkan produktivitas pelaku ekonomi dan kelenturan di penawaran agregat, yang pada gilirannya dapat menurunkan tekanan harga. Kondisi tersebut tergambar dari hubungan searah antara pengeluaran infrastruktur pemerintah dan perhitungan 'Solow Residual' sebagai proksi produktivitas perekonomian dengan jeda waktu sekitar dua hingga tiga tahun ke depan (Grafik 15.19).¹³

12 Mochtar, Firman. (2005). "Pengeluaran Infrastruktur Pemerintah dan Perilaku Inflasi di Indonesia". Mimeo. Bank Indonesia.

13 'Solow Residual' dihitung dari selisih antara PDB aktual dan konsep PDB potensial yang menggunakan modal dan tenaga kerja sebagai input produksi. Selisih dari produksi ini dianggap sebagai cerminan produktivitas perekonomian dalam periode tertentu. Lihat Romer, David. (1996). "Advanced Macroeconomics". hal. 26; Backus, Kehoe dan Kydland. (1995). "International Business Cycle: Theory and Evidence". Frontier of Business Cycle Research. hal. 335.



Grafik 15.19. Pengeluaran Infrastruktur Pemerintah dan 'Solow Residual'

Isu pengendalian subsidi energi juga mengangkat risiko lain. Besarnya subsidi energi akan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya alam yang tidak terbarukan (*nonrenewable resources*). Besarnya subsidi pada gilirannya juga akan mengganggu ketahanan fiskal secara keseluruhan. Defisit pada keseimbangan primer dalam dua tahun terakhir, tidak terlepas dari pengaruh besarnya subsidi BBM tersebut. Terakhir, subsidi energi yang berlebihan di tengah harga minyak dunia yang terus meningkat akan dapat menghambat proses penyesuaian ekonomi dan pada gilirannya berisiko meningkatkan kembali kerentanan perekonomian. Ekonomi domestik seolah terisolasi dari pengaruh perubahan harga global tersebut, namun sebenarnya pada sisi lain memicu kerentanan seperti yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Kenaikan konsumsi BBM akibat kuatnya permintaan domestik mendorong besarnya impor minyak dan kemudian berkontribusi pada melebarnya defisit transaksi berjalan. Ketahanan eksternal pada gilirannya menurun dan memberikan tekanan depresiasi terhadap nilai tukar rupiah. Bila kondisi ini tidak direspons dengan segera maka stabilitas ekonomi dapat terganggu dan berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Boks 15.1. Kapasitas Inovasi di Sektor Industri Pengolahan Indonesia

Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia karena memiliki pangsa yang dominan dan penyerap tenaga kerja yang besar. Sepanjang periode 2007-2013, sektor industri pengolahan secara rata-rata memiliki pangsa 26,1% terhadap PDB dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar keempat (12,88%) setelah sektor pertanian (37,84%), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (20,95%), serta sektor jasa (14,28%). Namun demikian, meskipun sampai saat ini masih memegang peranan penting dalam perekonomian, pertumbuhan sektor industri masih terbilang lambat, dengan rata-rata pertumbuhan 8,2% (1991-1997) dan 4,7% (2007-2013). Tren perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan Indonesia diindikasikan terkait dengan belum terintergrasinya sektor manufaktur Indonesia dalam jaringan rantai produksi regional Asia. Sementara itu, seiring dengan tren peningkatan upah tenaga kerja, negara-negara di kawasan telah melakukan reorientasi industri dari industri *low value added* menjadi *high value added*. Dengan demikian, rantai produksi domestik saat ini tidak dapat lagi mengandalkan tenaga kerja murah, namun perlu lebih fokus kepada barang-barang bermuatan teknologi tinggi.

Menurunnya kinerja sektor industri pengolahan ini tidak terlepas dari indikasi adanya sejumlah permasalahan di sektor tersebut yang belum tertangani dengan baik. Permasalahan penting yang dapat dicermati adalah perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor industri yang cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir dan rendahnya daya saing perusahaan-perusahaan manufaktur domestik.¹ Penyebab melemahnya produktivitas di sektor industri terkait erat dengan dukungan kapasitas inovasi dan kemajuan teknologi dalam perekonomian secara keseluruhan. Kedua aspek ini selanjutnya sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan aktivitas litbang (R&D) oleh pelaku ekonomi swasta (Diagram 1).

Perekonomian yang disertai dengan peningkatan kapasitas inovasi sektor manufaktur mampu tumbuh berkesinambungan. Dalam diskursus tentang pertumbuhan ekonomi, terdapat istilah "*innovation economy*" atau ekonomi yang berbasis inovasi. Ekonomi tersebut ditandai dengan berkembangnya aktivitas-aktivitas industri yang memiliki kapasitas inovasi tinggi sehingga menjadi motor pertumbuhan.



Diagram 1. Hubungan Kapasitas Inovasi dan Pendapatan/Kapita

1 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2010). "Revitalisasi Industri yang Didukung oleh Reformasi Birokrasi". Rapat Kerja Tahun 2010.

Tabel 1. Klasifikasi Perusahaan

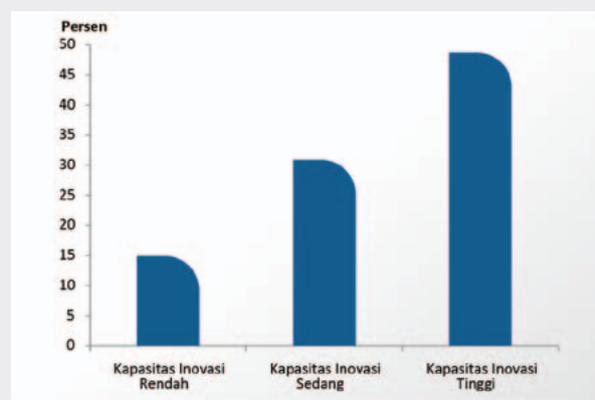
Kapasitas Inovasi	Karakteristik
Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada akumulasi modal fisik. - Sudah menyediakan kegiatan pelatihan bagi tenaga kerjanya. - Belum memberdayakan tenaga kerja dalam kegiatan inovasi
Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah menyadari pentingnya kegiatan inovasi. - Hanya terbatas pada pengembangan produk atau proses kerja
Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah memfokuskan pada pengembangan potensi inovasinya - Tersedianya unit litbang (R&D) - Dukungan tenaga kerja terlatih

Sebagaimana dirangkum dalam Diagram 1, dua komponen penting dalam *innovation economy* adalah kapasitas R&D dan modal sumber daya manusia (*human capital*). Berdasarkan konsep tersebut, negara yang mampu mengembangkan *human capital* dan kapasitas inovasi pelaku ekonomi di sektor industrinya akan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pangsa sektor industri pengolahan yang cukup besar dalam perekonomian, peningkatan kapasitas inovasi di sektor tersebut menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Berdasarkan hasil asesmen, mayoritas perusahaan di sektor industri belum terlalu memperhatikan aspek R&D.² Sebanyak 74% perusahaan memiliki kapasitas dan potensi inovasi rendah, sementara perusahaan dengan kapasitas dan potensi inovasi tinggi hanya sebesar 5%. Perusahaan-perusahaan berinovasi tinggi tersebut merupakan pelaku ekonomi yang lebih dekat dengan fenomena "*innovation economy*" di abad 21. Dalam perusahaan dengan kapasitas dan potensi inovasi tinggi sudah terdapat bauran kebijakan manajerial yang cukup intensif yang diarahkan kepada aktivitas litbang dan peningkatan kapasitas/kehandalan *human capital*-nya.

² Terkait asesmen ini, kajian dilakukan untuk mengidentifikasi kapasitas inovasi di sektor industri pengolahan dengan menggunakan Data Statistik Industri Besar dan Sedang (SIBS) dan metode *Analytic Network Process* (ANP). Inovasi diukur antara lain melalui ketersediaan kegiatan *Research & Development* (R&D) dalam perusahaan, dan kecukupan tenaga kerja terlatih (*human capital*) yang menunjang kegiatan inovasi. Klasifikasi perusahaan berdasarkan kapasitas inovasi dapat dilihat di Tabel 1.

Intensitas kegiatan ekspor di sektor industri pengolahan Indonesia diindikasikan terkait dengan inovasi perusahaan. Rendahnya inovasi perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan Indonesia masih memiliki tantangan dalam beradaptasi dengan era global di abad 21 dan dengan jaringan produksi regional Asia yang sudah mengarah ke *high value added*. Hanya 15% perusahaan-perusahaan dengan inovasi rendah yang melakukan aktivitas ekspor. Di sisi lain, 49% dari perusahaan dengan kapasitas inovasi tinggi melakukan aktivitas ekspor (Grafik 1), utamanya di bidang sub-industri makanan, bahan kimia, furnitur, dan sandang (Grafik 2). Dengan adanya aktivitas R&D dan ketersediaan *human capital* yang memadai, maka produktivitas perusahaan-perusahaan dengan kapasitas inovasi tinggi tentunya akan lebih baik, sehingga lebih berdaya-saing, dibanding perusahaan-perusahaan dengan kapasitas dan potensi inovasi rendah.

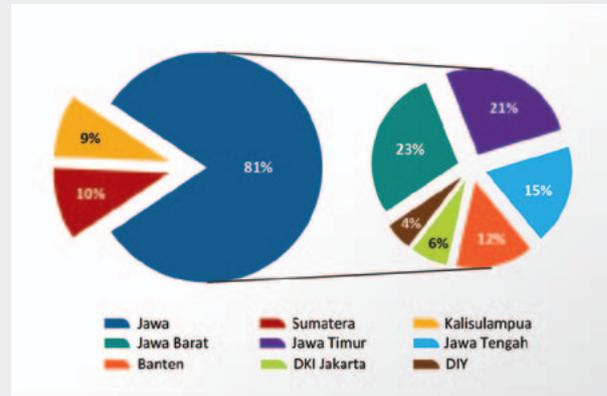


Grafik 1. Perbandingan Aktivitas Ekspor Perusahaan Berdasarkan Tingkat Inovasi



Grafik 2. Sub-Sektor Ekspor pada Perusahaan dengan Kapasitas Inovasi Tinggi

Dari aspek sebaran wilayahnya, perusahaan-perusahaan dengan potensi inovasi tinggi yang melakukan ekspor mayoritas berada di pulau Jawa yaitu propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten (Grafik 3). Hal ini terkait erat dengan dukungan infrastruktur, baik infrastruktur keras seperti jalan dan pelabuhan, maupun infrastruktur lunak seperti ketersediaan lembaga pendidikan dan litbang, yang relatif lebih baik. Ketersediaan *human capital* yang lebih banyak di pulau Jawa diindikasikan menjadi salah satu latar belakang konsentrasi industri dengan kapasitas dan potensi inovasi tinggi di Jawa. Ketersediaan faktor produksi yang lebih memadai di pulau Jawa tersebut selanjutnya membuat tingkat kembalian aktivitas produksi dan akumulasi kapital menjadi relatif lebih besar.



Grafik 3. Lokasi Perusahaan Berinovasi Tinggi yang Melakukan Ekspor

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum perusahaan-perusahaan di sektor industri di Indonesia belum sepenuhnya beradaptasi dengan realitas "*innovation economy*" di abad 21. Hal ini dapat memengaruhi daya saing sektor industri nasional baik di pasar global maupun domestik. Dengan kata lain, kapasitas dan potensi inovasi menjadi kunci bagi peningkatan daya saing sektor industri pengolahan nasional. Dengan demikian, langkah-langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah untuk memajukan industri Indonesia supaya lebih berdaya saing tetap perlu dilanjutkan. Di sisi lain, kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan modal dasar pembangunan perlu menjadi fokus perhatian, terutama untuk mendukung integrasi pengembangan kapabilitas industrial antara kawasan Jawa dan luar Jawa.

